DAFTAR ISI

JURNAL SIDANG MPR-RI

EDITORIAL **Hal.**
- Potret Lima Tahunan..... 2.

LAPORAN UTAMA
- Upaya Maksimal MPR dan Pimpinan MPR..... 3.
- Rekomendasi Pimpinan MPR Masa Jabatan 2004-2009..... 4.
- Rekomendasikan Pengelolaan Keuangan WTP..... 4.

LIPUTAN
- Saksi Sejarah Luncurkan Potret Konstitusi..... 6.
- Agung Laksono Luncurkan Buku di Penghujung Pengabdian..... 7.
- Indra J. Piliang MPR Belum Maksimal Lakukan Pekerjaan Terpenting..... 7.
- Marwah Daud: Banyak Hal Yang Telah dilakukan MPR..... 8.
- Taufik Kiemas: "Rivalitas Itu Hanya Dinamika Politik"..... 8.
- Hajriyanto: Kinerja MPR Sudah Bagus..... 8.
- H. Aisyah Hamid B. : Pencapaiannya Sudah Cukup Bagus..... 9.
- Ali Mochtar Ngabalin: Saya Happy Menjadi Anggota MPR..... 9.
- Alvin Lie: Kesan Hampa..... 9.
- Cecep Syarifuddin: Kinerja MPR Semakin Meningkat..... 9.
- Djoko Susilo: Saya Pernah Merasakan..... 10.
- Peluncuran Buku dan Makna Dasi..... 10.
- Kesan AM Fatwa: Alhamdulillah Bisa Menjaga Kebersamaan.... 11.
- Marwan Batubara: Perlu Ada Sistem Tepat Mengukur Kinerja MPR..... 11.

SERBA SERBI
- Minim Tepuk Tangan ..... 12.
- Pantun Penutup Sidang..... 12.
- Pamdal Siap Amankan Sidang MPR..... 12.
- Pos Kesehatan 1..... 12.
- Foto Lucu Haji Komar..... 12.

TOKOH HARI INI
- Salah Jalan Bikin Tertawa Orang..... 13.

- **Pidato Ketua MPR Dalam Masa Sidang Akhir Masa Jabatan** 14.

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI, **PENANGGUNG JAWAB** DR. C. Rahimullah, SH., M.Si, **PEMIMPIN UMUM** Drs. Eddie Siregar, M.Si **PEMIMPIN REDAKSI** M. Rizal, **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Yana Indrawan **REDAKTUR PELAKSANA** Elis Murniaty, Suratno **KOORDINATOR REPORTASE** Rharas Esthining Palupi, Adriansyah, **REDAKTUR FOTO** Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto **REPORTER** Euis Karmilah, Budi Muliawan, Rosando, Sopiah, Tengku Novan Muda Mulya, Tri Hastuti, Rudi M. Gultom, Jaka Sindu, Anggi Widia P, Suwarni, Bayu Setiadi, Suci Ati, Muammil Rokhily, Sugeng Irianto, Nita Juwita, Dian Arivani **FOTOGRAFER** Ari Soeprapto, Sugeng, Teddy Agusman, Wira, Eka Hindra Sasmita, Supardy, Iwan, Agung Sulistiono **PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI** Syamsul Bahri **KOORDINATOR DISTRIBUSI** Elly Triani **STAF DISTRIBUSI** Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani **SEKRETARIS REDAKSI** Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih, Fatmawati, Yenita Revi **TIM AHLI** Syahril Chili, Johni Yasrul, M. Husen, Rini S. Danudjaja, Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto, Iman Firdaus, Derry Irawan, Mustafa Helmy, Budi Sucahyono, Nurul Huda, Mauludi Rachman, Rianzi Gautama. **ALAMAT REDAKSI** Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, JakartaTelp. (021) 57895050, 57895051, 57895237, 57895238 Fax. (021) 57895051, 57895237

Potret Lima Tahunan

Semangat mereformasi MPR, sudah dilakukan saat reformasi bergulir di penghujung Orde Baru. Banyak perubahan yang terjadi dengan wajah MPR, seiring amandemen UUD 1945. Praktik dan pola hubungan ketatanegaraan kita pun ikut berubah. Apresiasi dan kritik mewarnai kiprah dan peran MPR selama 5 tahun terakhir. Yang paling menyolok seperti disampaikan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dalam pidato akhir masa jabatannya, MPR tidak lagi menjadi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Justru, kedaulatan dipegang oleh pemiliknya yang sah: rakyat. Kedaulatan itu kemudian dilaksanakan menurut aturan UUD NRI Tahun 1945. kosekuensinya, GBHN tak diproduksi lagi oleh MPR.

Bila kita ingin melihat potret MPR secara mutakhir, maka periode 2004-2009 merupakan yang terkecil sepanjang sejarah dari sisi jumlah personil pimpinannya. Hanya 4 orang (1 ketua dan 3 wakil ketua). Padahal, pada masa Orde Lama 5 orang. Naik pada masa Orde Baru 6 orang. Jumlah itu kian bertambah di masa awal reformasi, yaitu 9 orang.

Soal komposisi pimpinan MPR, memang, sempat terjadi polemik dan diskursus menarik. Dalam UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pimpinan MPR ditetapkan 5 orang (3 DPR 2 DPD) dengan ketua dari unsur DPR. Padahal, Ketua MPR sendiri sempat mengusulkan agar pimpinan MPR cukup 3 orang (2 DPR 1 DPD). Ini komposisi ideal, lantaran pekerjaan pimpinan MPR tak sepadat lembaga DPR.

Fungsi dan kewenangannya sudah banyak dipangkas. Adalah wajar tuntutan komposisi itu, bila dilihat dari perspektif anggaran dan efisiensi kerja. Namun, jangan lupa, ini adalah lembaga politik. *So*, kompromi dan kepentingan politik banyak terjadi. Di lain pihak, DPD menuntut kesetaraan, baik dari sisi jumlah maupun kursi ketua. Atas disahkannya UU tersebut, DPD mengajukan *judicial review* ke MK agar kursi ketua MPR dipilih secara terbuka dan demokratis. DPD merasa punya hak yang sama menduduki kursi ketua MPR.

Potret lainnya adalah lembaga ini tetap dipertahankan secara permanen, di tengah "guyuran" tuntutan agar MPR dijadikan lembaga *joint session* antara DPR dan DPD. Gagasan agar pimpinan MPR juga dijabat secara *ad hoc* oleh DPR dan DPD, tidak mendapat atau mungkin belum mendapat tempat. Kita belum tahu perkembangan politik ke depan yang berdampak langsung pada esistensi MPR kelak. Yang jelas, UUD, mengutip pidato Hidayat Nur Wahid, tidak memberi semangat joint session. MPR, ibarat pemadam kebakaran, selalu dibutuhkan dalam kondisi darurat dalam mengawal konstitusi.

Apa saja yang sudah dilakukan MPR periode 2004-2009? Yang paling dominan adalah menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR ke seluruh lapisan masyarakat. Berbagai bentuk sosialisasi sudah dilakukan. Dari cermah sosialisasi sampai cerdas cermat tingkat SLTA digelar. Dari komunitas awam sampai komunitas intelektual diundang untuk memahami konstitusi hasil amandemen. Bahkan, dari Sabang sampai Merauke disinggahi. Dari departemen ke departemen, dan dari Pemda ke Pemda didatangi.

Bila periode 1999-2004 sibuk mengamandemen, periode 2004-2009 sibuk menyosialisasikannya. Tahun 2009, aktivitas sosialisasi lebih banyak mengader tenaga *trainers* yang bisa menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 lewat kegiatan *Training of Trainers* (ToT). Kegiatan ini boleh dibilang efektif dalam membangun kesadaran berkonstitusi kepada masyarakat.

Tak ketinggalan *Focus Group Discussion* (FGD) yang menelaah kiprah dan peran parlemen dari perspektif hukum dan politik juga digelar MPR di sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Tanah Air. Para akademisi kampus mengeritik sekaligus memberi sumbangsih keilmuannya atas peran MPR selama 5 tahun terakhir. Seperti apa bentuk parlemen yang ideal ke depan, bisa dibuka dalam dokumen FGD. Sudah 10 kali FGD digelar dengan menghadirkan 320 akademisi.

Dari potret anggaran MPR periode 2004-2009, tampak sekali pimpinan MPR telah menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dengan efektif, efisien, berbasis kinerja, serta berdasar hukum yang jauh dari korupsi. Kesungguhan pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal dalam mengelola keuangan akhirnya berbuah apresiasi yang manis.

Hasil audit keuangan BPK yang tertuang dalam Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2008 No.10/S/V-XVI.1/06/2009 menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebuah predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada instansi negara yang telah mengelola keuangannya dengan sangat baik.

Begitulah potret singkat MPR kita selama 5 tahun terakhir. Kompromi, tawar-menawar, gagasan, kritik, masih terus bermunculan mewarnai kiprah MPR 5 tahun yang akan datang. Semua itu ditujukan untuk membentuk lembaga MPR yang lebih ideal. Kita mungkin masih mencari identitas dan bentuk. Sampai saatnya nanti kita menemukan formulasi yang tepat untuk mengarahkan MPR lebih permanen dan ideal. Apakah periode mendatang lebih baik atau justru lebih buruk, kita tunggu saja.(Elis Murniaty)

Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan Tahun 2004-2009

Upaya Maksimal MPR dan Pimpinan MPR

Jurnal MPR (30/9). Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid MA mengatakan, apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR selama kurun waktu lima tahun terakhir (2004-2009) merupakan upaya maksimal yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Tata Tertib MPR.

"Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas baik oleh MPR sebagai lembaga negara maupun oleh pimpinan MPR sebagai alat kelengkapan yang memimpin MPR, adalah hasil maksimal yang bisa dicapai sesuai dengan keterbatasan tugas dan wewenangnya," kata Hidayat dalam Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan Tahun 2004-2009 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (29/9).

Sidang Akhir Masa Jabatan MPR dihadiri Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla dan Ibu Mufida Kalla serta Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, anggota MPR dan istri, pimpinan lembaga negara, dan para teladan. Sekitar pukul 09.55 WIB, Wapres Jusuf Kalla memasuki ruangan didampingi Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa, Aksa Mahmud, dan Mooryati Soedibyo.

Agenda sidang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka sidang secara resmi dan terbuka untuk umum. Sidang diikuti 341 orang dari 678 anggota MPR yang berasal dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. "Sehingga berdasarkan ketentuan rapat paripurna memenuhi syarat dan dibuka untuk umum," kata Hidayat sambil mengetuk palu. Selanjutnya, Ketua MPR menyampaikan laporan kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan Tahun 2004-2009.

Dalam Laporan Kinerja Pimpinan MPR, Hidayat Nur Wahid memaparkan sejumlah hal yang telah dicapai MPR sebagai lembaga negara dan pimpinan MPR sebagai alat kelengkapan yang memimpin MPR. Selama kurun waktu lima tahun, pimpinan MPR telah melakukan berbagai kegiatan penting MPR, dimulai dengan pelantikan anggota MPR, pembentukan fraksi dan kelompok anggota MPR, pemilihan pimpinan MPR, pengesahan perubahan peraturan tata tertib MPR, dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2004-2009 hasil Pemilu 2004.

Salah satu tugas pimpinan MPR selama kurun waktu lima tahun adalah sosialisasi UUD NRI Tahun 1945. Sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai metode yaitu pemaparan dan dialog langsung, *Training of Trainers* (TOT), sosialisasi langsung di setiap provinsi dan instansi, dialog MPR ke daerah dan sekolah-sekolah, pelaksanaan cerdas cermat konstitusi tingkat nasional bagi siswa SMU, penerjemahan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, serta pendayagunaan media *e-demokrasi* di *website.ww.mpr.go.id.*

Pencapaian lain selama kurun waktu lima tahun adalah pengelolaan keuangan MPR yang memperoleh apresiasi positif dari BPK dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menyelenggarakan kegiatan pengkajian kemajelisan seperti kajian kelembagaan MPR, kajian terhadap UU Susduk; menerbitkan buku, buletin Majelis, dan jurnal Majelis, penyusunan buku risalah perubahan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR, peringatan Hari Ulang Tahun MPR RI dan Hari Konstitusi, pengelolaan aset MPR RI, serta penyerahan arsip MPR ke Arsip Nasional RI.

"Laporan kinerja MPR dan Pimpinannya masa bakti 2004-2009 ini diharapkan dapat merepresentasikan gerak langkah MPR dan pimpinannya yang telah dilakukan sungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya yang limitatif itu," kata Hidayat Nur Wahid.

Usai menyampaikan Laporan Kinerja, sidang paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 2004-2009 ditutup dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufida meninggalkan tempat didampingi Ketua dan Wakil Ketua MPR. (Budi Sucahyo/Tuti)

Rekomendasi Pimpinan MPR Masa Jabatan 2004-2009

Pada bagian akhir laporan, pimpinan MPR RI 2004-2009 menyampaikan rekomendasi dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan menghadirkan MPR dan pelaksanaan tugas pimpinan MPR masa jabatan 2009-2014 yang lebih baik. Berikut rekomendasinya:

Pertama, penguatan kelembagaan MPR RI. Pimpinan MPR periode 2009-2014 berjumlah lima orang, lebih banyak dari jumlah Pimpinan MPR periode 2004-2009. Dengan demikian diharapkan mereka nanti lebih kuat dan lebih efektif melaksanakan tugas dan wewenang ke-MPR-an untuk terus menjaga MPR sebagai lembaga yang terhormat.

Kedua, tindak lanjut pemasyarakatan putusan MPR RI. Selain melanjutkan sosialisasi putusan MPR-UUD NRI Tahun 1945 yang sudah ada, perlu terobosan, ijtihad, dan inovasi baru mengenai metoda pemasyarakatan putusan MPR ke berbagai kalangan masyarakat. Karena itu, perlu tindak lanjut mengenai:

a. Optimalisasi narasumber *training of trainers.* Optimalisasi narasumber ini agar sosialisasi di daerah dan beragam instansi pusat semakin bergulir lebih cepat dan lebih baik.
b. Dialog interaktif di TVRI dan RRI. Pemasyarakatan putusan MPR melalui dialog interaktif di TVRI dan RRI perlu dilanjutkan mengingat metoda ini sangat efektif karena mampu menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
c. Cerdas cermat konstitusi. Sosialisasi melalui cerdas cermat konstitusi sangat efektif untuk para generasi muda dan pelajar. Karena itu, pimpinan MPR masa jabatan 2009-2014 perlu mempertimbangkan kesinambungan pelaksanaannya dengan peserta tidak hanya di tingkat SLTA, tetapi di PTN dan SMP.
d. Muatan konstitusi dalam kurikulum sekolah. Pemasyarakatan konstitusi melalui media pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi sangat efektif. Karena itu, perlu terobosan agar materi konstitusi ini dapat ditetapkan menjadi salah satu muatan dalam kurikulum sekolah baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.
e. Peringatan Hari Konstitusi. Dengan ditetapkannya tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, maka seluruh komponen bangsa perlu terus mencari terobosan agar memperingati Hari Konstitusi dapat menggelorakan cinta dan kesadaran berkonstitusi.
f. Peringatan Hari Ulang Tahun MPR RI. Sebagai bentuk penghargaan terhadap *founding fathers* yang telah berjuang untuk lahirnya MPR, maka tradisi peringatan HUT MPR pada setiap tanggal 29 Agustus perlu untuk terus dilaksanakan di masa akan datang.
g. Pembangunan Museum MPR. Sampai berakhirnya masa jabatan pimpinan MPR periode 2004-2009, museum ini belum dapat direalisasikan, maka sangat baik bila MPR periode 2009-2014 dapat mewujudkannya dengan menjadikan aset Gedung MPR di Bandung sebagai Museum MPR.
h. Melanjutkan pengelolaan keuangan MPR yang Wajar Tanpa Pengecualian. Predikat tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang diraih MPR merupakan bagian dari kinerja pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal. Komitmen ini perlu dilanjutkan sehingga MPR akan selalu hadir sebagai lembaga negara yang terhormat.(Budi S/Tuti)

Pimpinan MPR 2004-2009:

Rekomendasikan Pengelolaan Keuangan WTP

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid merekomendasikan untuk melanjutkan pengelolaan keuangan MPR yang wajar tanpa pengecualian. Hal itu disampaikan oleh Ketua MPR pada Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Tahun 2004-2009, di Gedung Nusanta, Selasa (29/9). Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggota MPR RI, Pimpinan Lembaga Negara, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Hidayat mengatakan, dalam pengelolaan anggaran Majelis, Pimpinan MPR telah menetapkan kebijakan agar dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan efektif dan efisien, berbasis kinerja serta berdasar hukum, jauh dari korupsi.

Sesuai dengan arah, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR menugasi Sekretaris Jenderal MPR untuk melakukan pengelolaan keuangan MPR sehari-hari dalam rangka mendukung kegiatan MPR dan alat kelengkapannya.

Kesungguhan Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal dalam mengelola keuangan MPR akhirnya memperoleh apresiasi yang positif berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan MPR RI Tahun 2008, dengan meraih prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Predikat ini, kata Hidayat, merupakan predikat tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan Negara yang diraih MPR adalah bagian dari kinerja Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbasis kinerja dan taat hukum.

Untuk itu, kata Hidayat, jika komitmen ini dilanjutkan, akan menjadikan MPR sebagai lembaga Negara yang dapat merealisasikan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, sehingga MPR akan selalu hadir sebagai lembaga Negara yang terhormat. (Tuti)

Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa

Saksi Sejarah Luncurkan Potret Konstitusi

Jurnal MPR (30/9).Diakhir jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI A.M Fatwa meluncurkan sebuah buku berjudul: "Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945". Sosok pria berkacamata ini merupakan saksi sejarah konstitusi dan pernah memimpin sosialisasi amandemen UUD 1945. "Saya tidak terlibat secara akademis dalam amandemen UUD 1945 tetapi secara politis ikut memutuskan," ujarnya saat memberikan sambutan di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Senin (28/9).

Menurut Fatwa, sudah lama UUD1945 tidak bisa diubah bahkan disakralkan. Padahal mengamandemen sebuah UUD merupakan satu keniscayaan sebab dalam kehidupan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.

Sejak bergulirnya reformasi 1998 barulah menemukan momentum politik untuk mengadakan amandemen dan hingga sekarang sudah empat tahap dilakukan amandemen yaitu melalui Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001 dan 2002 dengan tetap mempertahankan keaslian pembukaan UUD 1945. Amandemen juga merupakan salah satu amanat dari reformasi. "Karena itu kalau ada yang berpikir untuk kembali ke UUD 1945 yang asli itu tidak rasional," kata Fatwa.

Tampak hadir dalam peluncuran buku itu Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR RI Agung Laksono, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Deputi Bidang Kemahasiswaan Universitas Paramadina Wijayanto, dan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas yang diberikan waktu menyampaikan uraian singkat isi buku.

Dalam pandangan Mahfud MD, buku yang diluncurkan belum tergambar secara detil mengenai potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945 namun sudah menggambarkan informasi-informasi penting ke arah perubahan. "Buku ini menggambarkan beberapa peristiwa akan proses pembahasan amandemen UUD 1945 dimana didalamnya terjadi pergulatan panas, baik dari dalam maupun luar," tuturnya.

Ketua MK ini pun mengulas bahwa dalam buku tersiratkan bahwa konsititusi tidak perlu mengikuti teori apapun, karena konstitusi adalah pilihan atau kesepakatan sesuai hati nurani bangsa. "Buku ini bisa memberikan informasi penting tentang sejarah konstitusi atau amandemen UUD 1945," katanya.

Sedangkan Deputi Bidang Kemahasiswaan Universitas Paramadina Wijayanto, merasakan peluncuran buku tepat waktu ketika terjadi pentransferan anggota MPR. Diharapkan dengan diluncurkannya buku ini dapat menjembatani anggota MPR lama ke baru. Wijayanto berharap, anggota MPR mengubah *rule of the game* (peraturan) konstitusi menjadi lebih mudah. Serta mendorong penguatan karakter bangsa menjadi lebih kuat dengan promosi yang baik.

Sedangkan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Trya Kuncahyo menilai, buku karya AM Fatwa telah berhasil memotret secara jernih, karena beliau merupakan pelaku sejarah yang mengetahui secara persis pergolakan sejarah. "Sangat membantu mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 dan sangat penting sebagai buku pedoman anggota MPR yang baru," tegas pria berkacamata itu.

Setiap mengakhiri masa jabatan di parlemen, A.M. Fatwa selalu membuat catatan yang diterbitkan dalam bentuk buku. Ketika mengakhiri masa jabatan sebagai wakil ketua DPR, Fatwa menerbitkan buku berjudul "Dari Cipinang ke Senayan" (2003). Kini, untuk mengakhiri masa bhaktinya sebagai Wakil Ketua MPR dia meluncurkan buku berjudul "Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945" (2009). Buku setebal 327 halaman itu berisi pergulatan amandemen UUD 1945 yang penuh dengan pro dan kontra. (Dian Arivani/ Iman Firdaus)

Agung Laksono Luncurkan Buku
di Penghujung Pengabdian

Jurnal MPR (30/9). Di hari-hari terakhir sebagai Ketua DPR periode 2004-2009, Agung Laksono meluncurkan buku berjudul: "Dari Rumah Rakyat Mengawal Demokrasi." Acara peluncuran buku ini berlangsung Senin (28/9) di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR, dihadiri sejumlah anggota DPR, Menkokesra Aburizal Bakrie dan Panglima TNI Djoko Santoso.

"Buku yang menjelaskan perjalanan dari awal sampai akhir selama di DPR," kata Agung mengenai bukunya ini.

Ia menjelaskan, buku ini berisi tentang jejak pengabdiannya yang komprehensif selama lima tahun menjadi Ketua DPR. "Selain memuat kiprah saya selama memimpin DPR, saya juga menyampaikan secara ringkas perjalanan hidup saya," jelas Agung. Selain memuat keterlibatannya di dunia organisasi politik.

Kepada pimpinan DPR periode 2009-2014, Agung berharap agar parliamentary reform dapat dilanjutkan. Parlemen, menurut Agung, mempunyai peran penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional. Peran parlemen dalam kancah politik internasional ditandai dengan aktifnya DPR di berbagai forum regional maupun internasional.

"Kita aktif ditingkat regional dan internasional. Di tingkat IPU, Indonesia bahkan telah dua kali menjadi tuan rumah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir," jelas Agung.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengulas buku karya Agung ini dari sudut pandang diplomasi parlemen. "Diplomasi parlemen DPR 2004-2009 semakin intens dan memberi kontribusi bagi kepentingan nasional," katanya.

Sedangkan peneliti senior LIPI Syamsudin Haris mengomentasi sosok Agung sebagai politisi yang menjalani karier politiknya dari bawah. "Ia mengawali karier politiknya secara bertahap," katanya. Agung memperoleh kemampuan berpolitik secara otodidak. Jadi, "Ditempa pengalaman bukan pendidikan," jelasnya.

Menurut Syamsuddin Haris, buku yang diluncurkan pada masa Agung Laksono sebagai Pimpinan DPR merupakan yang paling menarik untuk dibaca. (Budi Sucahyo/Tuti)

Indra J. Piliang, Pengamat Politik
MPR Belum Maksimal Lakukan Pekerjaan Terpenting

Jurnal MPR (30/9). Pengamat Politik Indra J Piliang menilai, MPR periode 2004-2009 belum maksimal melakukan pekerjaan terpenting, yakni sosialisasi UUD 1945 hasil amandemen.

"MPR terkesan hanya menjalankan fungsi seremonial," tandas Indra saat diwawancarai Jurnal sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan MPR periode 2004-2009, dan pelantikan anggota MPR baru periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang.

Lebih lanjut ia mengatakan, dibandingkan dengan DPR dan DPD, MPR terlihat sebagai organisasi yang lebih lemah. Ia membandingkan ketika MPR dipimpin oleh Amin Rais di periode sebelumnya yang berhasil melakukan amandemen UUD 1945 dan melakukan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur.

"Ketua MPR selama lima tahun terakhir ini lebih menonjol sebagai tokoh Parpol," katanya menambahkan. Padahal, katanya, dengan keterbatasan yang dimiliki MPR bisa menjalankan fungsi intermediasi antara lembaga Negara ataupun memberikan semancam briefing konstitusi agar masyarakat bisa memahami konstitusi hasil amandemen itu dengan baik.

Sementara itu, dalam acara *Press Ghatering* yang berlangsung Senin (28/9), Pimpinan MPR - yang terdiri dari Hidayat Nur Wahid (Ketua) didampingi Wakil Ketua A.M. Fatwa, Aksa Mahmud dan Mooryati Soedibyo - menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas selama lima tahun memangku jabatan sebagai pimpinan majelis.

Para pimpinan MPR ini menyatakan, sosialisasi UUD NRI 1945 telah berjalan baik berkat kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya kalangan masyarakat, tokoh agama, akademisi serta peran pers yang cukup membantu atas suksesnya sosialisasi.

Menanggapi tentang kemungkinan amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945, AM. Fatwa menyatakan, itu semua tergantung momentum dan gerakan politik. Namun, untuk kembali ke UUD 1945 merupakan langkah mundur. Pasalnya, amandemen UUD 1945 adalah salah satu tuntutan reformasi 10 tahun lalu, dan kini hanya tinggal melanjutkannya saja.(NT)

DR. Marwah Daud Ibrahim:
Banyak Hal yang Telah Dilakukan MPR

Jurnal MPR (30/9). Bagi DR. Marwah Daud Ibrahim menjadi anggota MPR periode 2004-2009 mempunyai kesan sendiri. "Bagi saya setiap periode mempunyai arti tersendiri. MPR sekarang kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya. Kalau dulu nggak," kenangnya. Memang keterlibatan Marwah di MPR terbilang panjang. Selama 17 tahun dilaluinya bersama para politisi di Senayan dengan bendera Golkar.

Ketika ditanya tentang pidato Akhir Masa Jabatan MPR 2004-2009, Marwah mengaku *surprise*. "Selama ini MPR tidak pernah menyelenggarakan sidang paripurna. Dipikir tidak sibuk, ternyata banyak hal yang telah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari fungsi sosialisasi. MPR ternyata melakukan banyak hal," ungkap pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang pernah berpasangan dengan Gus Dur dalam Pilpres 2004.

Baginya catatan yang paling penting dari MPR saat ini adalah kinerjanya yang sesuai dengan amanah konstitusi. Tentang bagaimana MPR ke depan, Marwah mengatakan, kita tidak bisa melihat lembaga negara secara sendiri-sendiri. "Bagi saya ada yang perlu digarisbawahi, ke depan kita tidak bisa melihat secara parsial. Kita harus melihat seluruh lembaga yang ada di sini. Sistem kenegaraan kita harus di-*review*. Baru kita bisa melihat sistem ketatanegaraan kita bagaimana? DPR bagaimana? DPD bagaimana?" ucap mantan pelajar teladan Sulawesi Tengah ini.(Nurul Huda)

Taufik Kiemas:
"Rivalitas Itu Hanya Dinamika Politik"

Jurnal MPR (29/9). Perhelatan Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2004-2009 dilaksanakan Selasa (29/09) pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla, beberapa Menteri Negara, seluruh pimpinan MPR dan dihadiri 341 anggota dari 678 anggota MPR RI berlangsung lancar. Nun jauh di baris terdepan duduk dan memerhatikan dengan seksama H. Moh. Taufik Kiemas, anggota MPR RI dari fraksi PDIP yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP.

Ada yang agak aneh, anggota MPR H.Taufik Kiemas terlihat benar-benar serius memerhatikan pidato Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid. Pemandangan ini terlihat sedikit janggal mengingat sebagian besar anggota ngobrol sendiri. Juga, santer dikabarkan akhir-akhir ini Hidayat menjadi saingan beratnya dalam bursa calon Ketua MPR RI mendatang.

Ditemui usai sidang, Taufik Kiemas mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ketua MPR RI dalam pidatonya sejalan dengan pikirannya. "Semua apa yang dibilang pak Ketua MPR sama saja dengan saya. Intinya, kita ingin membuat bangsa ini maju ke depan. Kemajuan kinerja MPR baguslah,"kata Taufik Kiemas. Menurut suami Megawati Soekarnoputri itu, apa-apa yang dipesankan dan yang sedang dikerjakan MPR masa sekarang harus dijalankan juga ini sebagai pedoman untuk MPR masa datang.

Ketika disinggung soal pencalonan dirinya sebagai kandidat kuat menduduki kursi Ketua MPR RI, Taufik mengungkapkan bahwa dirinya sudah positif dicalonkan oleh partai untuk jabatan itu. "Kita lihat sajalah, saya sudah positif dicalonkan tinggal melihat respon *floor* saja, tim saya sudah dan sedang mengadakan lobi-lobi ke partai lain, hasilnya ya..insya Allah. Kalau Anda tanya apakah saya siap, ya saya siap dong, kalau saya tidak siap mana mau orang dukung saya," jelas Taufik.

Jurnal MPR pun terus mencecar dengan pertanyaan seputar keyakinannya maju sebagai Ketua MPR. Soal rivalitas dengan ketua MPR RI saat ini, Taufik menjelaskan bahwa dalam dinamika politik, ini tidak ada rivalitas. Hidayat Nur Wahid orang yang terhormat dan sah-sah saja untuk maju menjadi Ketua MPR kembali. Sesaat kemudian Taufik Kiemas menoleh ke kiri dan kanan seolah mencari-cari seseorang. "Anda tahu pak Ketua (Ketua MPR) dimana ya? Saya mau ketemu, mau ngobrol sedikit," ujar Taufik Kiemas.

Ada apa gerangan sang kandidat Ketua MPR ini ingin bertemu dengan Ketua MPR? Hanya beliau yang tahu. Apakah kegarangan oposan dari kubu Banteng melunak begitu Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR RI? Taufik menjawab: "Ha ha ha ..kaya yang tahu saja Anda."(Derry Irawan)

Drs. H. Hajriyanto Y. Tohari
Kinerja MPR Sudah Bagus

Jurnal MPR (30/9). Drs. H. Hajriyanto Y Tohari menilai, kinerja MPR RI periode 2004-2009 sudah bagus. "Dari laporan kinerja Pimpinan MPR dibacakan menunjukkan kinerja MPR sudah bagus," katanya usai Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan, di Gedung MPR/DPR, Selasa (29/9). Artinya, Pimpinan MPR sudah melaksanakan tugasnya paralel dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh MPR sesuai UUD NRI Tahun 1945.

Namun, Hajriyanto memberi catatan bahwa Pimpinan MPR tidak perlu menyatakan bahwa tugas MPR dan pimpinannya sangat terbatas (limitatif). "Karena kalau tidak ada sidang-sidang paripurna MPR maka tidak bisa dikatakan bahwa MPR pasif. Justru, tidak ada sidang-sidang MPR menunjukkan negara dalam kondisi yang baik, stabil, dan memungkinkan dilakukannya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Ini menunjukkan negara ini berjalan baik," ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebaliknya, jika MPR melakukan beberapa kali sidang paripurna, Hajriyanto memastikan terjadi krisis di negara ini. "Bisa berupa krisis konstitusi atau krisis politik. Kalau MPR sampai bersidang melantik presiden lebih dari sekali, tentu negara ini mengalami krisis. Negara ini berjalan tidak baik. Karena itu, aktif atau tidaknya MPR bukan dilihat dari sering tidaknya bersidang," jelasnya.

Soal tidak perlu adanya tanggapan dari fraksi-fraksi MPR atas laporan kinerja pimpinan MPR ini, Hajriyanto melihat bahwa laporan kinerja itu tidak perlu ditanggapi. "Ini kan tidak terjadi apa-apa, jadi tidak perlu ditanggapi fraksi-fraksi MPR," terangnya. (Budi Sucahyo/Tuti)

H. Aisyah Hamid Baidlowi

Pencapaiannya Sudah Cukup Bagus

Jurnal MPR (30/9). Sebagai politisi, Aisyah Hamid Baidlowi memang memiliki kesan khusus terhadap pidato Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid pada Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan tahun 2004-2009. "Bagi saya catatannya menyeluruh. Ada bagian tugas yang sebetulnya penting, tapi tidak ditonjolkan. MPR harusnya lebih bisa melakukan diplomasi melalui konstitusi dengan pimpinan lembaga luar negeri. Bagaimana menjalin kebersamaan dan persahabatan," ungkap aktivis organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama ini. Menurut Aisyah, pencapaian yang sudah dilakukan MPR cukup bagus.

Aisyah berpendapat, seharusnya peran MPR ke depan yang perlu ditonjolkan adalah diplomasi kepada lembaga sejenis di luar negeri. Hal ini agar lembaga MPR mempunyai peran lebih di percaturan international. "Ini sebenarnya yang harus dilakukan bagi MPR ke depan," ucapnya. Cucu K.H. Hasyim Asy'ari ini juga berpendapat, seharusnya laporan pertanggungjawaban jangan terlalu rinci. "Kesannya kayak laporan ormas," tambah anggota MPR dari unsur DPR/Golkar ini, sambil tersenyum.

Ditanya mengenai kesan pribadi ketika menjadi anggota MPR masa bakti 2004-2009 dengan singkat Aisyah menjawab: "Saya tidak punya kesan menonjol di MPR. Saya lebih banyak aktif di DPR".(Nurul Huda)

Ali Mochtar Ngabalin:

Saya Happy Menjadi Anggota MPR

Jurnal MPR (30/9). Kinerja MPR Periode 2004-2009 ini telah mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan konstitusi. Untuk mengukurnya tidak bisa dengan ukuran parlemen pada periode dahulu. Perubahan UU itulah yang menyebabkan status, fungsi, dan termasuk kinerja MPR menjadi seperti sekarang ini. Alhamdulillah kita lihat kinerja MPR di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid sangat sukses.

Hidayat Nurwahid dengan semangat mengkoordinasikan kawan-kawan, kemudian menugaskan kawan-kawan untuk melakukan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Rakyat bisa mendapatkan informasi adanya perubahan UUD dan produk turunannya. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan di berbagai tempat, dari pelosok Sabang sampai Merauke, seperti yang dikatakan dalam pidato Sidang Akhir Masa jabatan tadi yang harus menempuh perjalanan yang memakan waktu dan menggunakan berbagai macam transportasi untuk bisa menuju tempat. Saya merasa happy mengakhiri masa jabatan MPR periode 2004-2009.

MPR merupakan merupakan representasi dari suatu majelis yang menghimpun aspirasi masyarakat. Jujur saya harus katakan bahwa di MPR ini kita bisa saling mengenal dengan teman-teman di DPR dan DPD dan bisa saling duduk berdekatan. Jarang ada pertemuan dengan waktu yang bersamaan antara anggota DPR dan DPD.

Pesan saya yang akan datang, harus ada sistem nilai dari MPR periode saat ini untuk MPR yang akan datang. Paling terpenting adalah lembaga MPR harus dijaga dengan baik sebab MPR adalah satu majelis yang mengawali dan mengakhiri persidangan selama 5 tahun sekali, melantik presiden dan wakil presiden. Suatu saat dalam suasana tertentu, MPR menjadi institusi yang sangat penting untuk menentukan suatu status presiden dan wakil presiden karena ada kelowongan. Untuk itu ke depan, MPR harus dijaga dan dirapikan.(Ardi Winangun)

Alvin Lie:

"Kesan hampa."

Jurnal MPR (30/9). Anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alvin Lie ternyata punya catatan tersendiri tentang pidato Akhir Masa Jabatan MPR 2004-2009. Pria yang dikenal sangat vocal ini menyatakan bahwa apa yang telah diungkapkan hanya menceritakan riwayat MPR. "Intinya gini, apa yang tadi telah diutarakan lebih menceritakan tentang riwayat MPR. Terus terang saya menilai, pekerjaan strategis yang telah dilakukan MPR hanya Sosialisasi UUD 1945 hasil amandemen saja," katanya.

Bagi Alvin, selama menjadi anggota MPR tidak mempunyai kesan apa-apa. "Kesannya hampa. Kalau dulu ada sidang tahunan. Dalam sidang ini kita bisa melihat kinerja lembaga negara, tapi tidak bisa kita rasakan," ujar Alvin Lie.

Alvin yang oleh beberapa media dijuluki "koboy senayan" sudah dua periode menjadi anggota DPR RI (1999-2004, 2004-2009). Alvin adalah politisi yang memiliki dasar sebagai pengusaha di Semarang. Kemampuan bisnisnya ditopang oleh pendidikan (S1) di *The Chartered Institute of Marketing*, Univ Inggris (1990) dan (S2) International Marketing, Stratchclyde University Skotlandia (1997).

Alvin di kalangan wartawan adalah sosok yang komentarnya enak dikutip.(Nurul Huda)

Cecep Syarifuddin

Kinerja MPR Semakin Meningkat

Jurnal MPR (30/9). Kinerja MPR Periode 2004-2009, trennya dari hari ke hari semakin baik. Tetapi yang paling penting dan fokus dalam keberhasilan MPR sekarang adalah bagaimana rakyat bisa menemukan dirinya di dalam UUD. Sehingga rakyat bisa terlibat dalam segala proses ketatanegaraan. Konstitusi kita sekarang bukan hanya menjadi rujukan tetapi merupakan *living constitution* atau *open constitution*, kontistusi terbuka dan hidup. Dari pemahaman terhadap konstitusi kita lihat bagaimana rakyat sekarang bisa melakukan *judicial review* terhadap UU bila dirasa UU itu tidak adil.

Ini semua merupakan berkat sukses dari sosialisasi yang dilakukan. Secara kuantitas dan kualitas sosialisasi itu semakin berhasil. Untuk itu kinerja ini harus ditingkatkan agar lebih berkualitas, efisien, efektif, dan produktif sehingga konstitusi kita akan menjadi acuan dalam setiap langkah.

Saya bangga sebagai anggota MPR Periode 2004-2009 karena MPR ini sudah mampu menjalankan apa yang diamanatkan UU. Saya juga bangga karena konstitusi kita merupakan produk dari reformasi. Hal ini sukar terjadi bila tidak ada reformasi.

Menurutnya, memasuki masa reformasi, demokrasi berkibar di mana-mana. Tidak saja lewat pemilu, tapi sistem ketatanegaraan kita juga berkembang pesat seiring tuntutan reformasi. Meski demikian, perjalanan bangsa ini dalam berdemokrasi tetap harus dikontrol agar tidak terperosok ke dalam kebebasan tanpa batas atau terkungkung kembali dalam otoritarianisme.

Bangsa yang beradab tentu punya etika. Dan, sejak tahun 2001, MPR RI mengeluarkan TAP No.6 tentang Etika dan Perkembangan Demokrasi Bangsa. Lahirnya TAP ini, dipengarui oleh lemahnya pemahaman kita terhadap etika berbangsa dan beragama.(Ardi Winangun)

Djoko Susilo:
Saya Pernah Merasakan

Jurnal MPR (30/9). Saya menjadi anggota MPR, dua kali periode, Periode 1999-2004 dan 2004-2009. MPR Periode 1999-2004, sibuk sekali dengan berbagai agenda seperti melaksanakan reformasi konstitusi dan reformasi ketatanegaraan. Sekarang dalam MPR Periode 2004-2009, saya hadir dalam Sidang Akhir Masa Jabatan, ibaratnya seperti tutup kendang. Dibuka lima tahun yang lalu dan ditutup sekarang. Selama lima tahun sebagai anggota saya tidak tahu apa yang dikerjakan MPR. Kalau saya saja tidak, tahu apalagi masyarakat. Sehingga menurut saya, MPR saat ini tidak ada hasilnya atau kinerjanya rendah sekali.

Bila dikatakan MPR telah melakukan kerja seperti yang tertuang dalam pidato Sidang Akhir Masa Jabatan, itu hanya omongannya pimpinan MPR. Jadi menurut saya, ke depan harus dipilih pimpinan yang betul-betul konsekwen dan kerja keras untuk memajukan masyarakat. Jadi kalau kita lihat laporan yang dibacakan oleh pimpinan MPR tadi, itu *nonsense*. Nonsense karena saya sebagai anggota MPR saja tidak merasakan apalagi rakyat dan bangsa. Ini bisa terjadi karena ada persoalan kinerja. Untuk itu lima tahun ke depan harus ditingkatkan.

MPR Periode 2004-2009 berbeda dengan MPR periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, keterlibatan saya sangat tinggi, selain itu anggota benar-benar memahaminya dengan baik. Sehingga dalam periode ini kesan saya ya biasa-biasa saja. Mungkin masyarakat lainnya mengatakan, Oo... MPR itu ada to. Mereka mengatakan demikian karena kegiatannya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Semua itu terjadi bukan karena kedudukan institusi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi namun karena ada persolan kepemimpinan MPR. Pimpinan MPR sekarang, saya kira kurang mampu dalam mengangkat kinerja MPR secara maksimal. Jadi ini pelajaran yang baik, jadi pelajaran ke depan untuk MPR Periode 2009-2014 agar bisa lebih bekerja keras.(Ardi Winangun)

Peluncuran Buku dan Makna Dasi

Jurnal MPR (30/9). Pada saat Pidato Ketua MPR pada Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Tahun 2004-2009 sedang berlangsung, anggota MPR dengan nomor anggota A-216 Abdullah Azwar Anas dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyelenggarakan acara peluncuran bukunya yang berjudul: "Mengawal Negara Budiman."

Menurut Abdullah Azwar Anas, bukunya ini adalah kelanjutan dari pertanggung jawabannya kepada publik selama menjadi anggota MPR/DPR RI. Buku tersebut juga berisikan rekam jejak selama dia menjadi anggota parlemen, termasuk kegigihannya menjadi salah satu pemrakarsa hak angket BBM.

Anas, panggilan akrabnya, melangsungkan peluncuran tersebut di *Press Room* yang dihadiri Ketua DPR RI Agung Laksono, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, sejumlah ketua fraksi, Guru Besar Universitas Gajah Mada Danang Parikesit, pengamat Formappi Sebastian Salang dan juga Sekjen Pekerjaan Umum.

Acara peluncuran buku berlangsung meriah, anggota MPR dari daerah pemilihan Jatim 3 yang meliputi daerah Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini memang terkenal vokal dan cukup dekat dengan kalangan wartawan.

Pada saat berbicara di depan insan media massa, meski dalam suasana serius, dia sempat melirik dasi yang politisi senior Ferry Mursyidan Baldan dari Fraksi Partai Golkar. "Wah dasi yang saya pakai ternyata sama dengan dasi Pak Ferry. Sama-sama pink, sama-sama enggak jadi, tapi lain dengan yang di sebelah saya (maksudnya Agung Laksono) warna dasinya hijau masih belum jelas" kata Anas tersenyum seraya menoleh ke arah Agung.

Anas dalam pemilihan anggota DPR RI periode 2009 – 2014 memang kembali mencalonkan diri, tetapi tidak terpilih. Demikian juga Ferry mencalonkan dari di daerah pemilihan Jawa Barat juga tidak terpilih. Gemuruhlah tawa seisi ruangan. Dan, Agung pun menimpali, tidak apa-apa Pak Abdullah. "Tidak jadi anggota yang penting sebentar lagi akan jadi bupati," kata Agung membalas candaan Anas.

Sebagai anggota dewan yang potensial dan masih muda, Anas memang menerima kekalahannya ini dengan hati yang "legowo". Baginya kalah menang dalam proses pemilihan anggota legislatif adalah bagian dari dinamika perpolitikan nasional yang harus dapat diterima oleh siapapun yang mencalonkan.

Itulah Abdullah Azwar Anas putra Banyuwangi yang cukup dikenal didaerahnya yang selalu membawa aspirasi masyarakat Jawa Timur.

Pemimpin budiman

Ketika diberi kesempatan bicara, Ketua DPR RI yang juga Anggota MPR RI dengan nomor A-449 Agung Laksono mengatakan, tidak hanya di kalangan eksekutif yang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang budiman, tetapi di kalangan legislatif pun diperlukan pemimpin-pemimpin berjiwa demikian.

Agung lebih lanjut mengatakan, salah satu tokoh legislatif yang budiman itu adalah Abdullah Azwar Anas. Karena, kata Agung, Anas (panggilan akrabnya) termasuk anggota yang rajin menghadiri setiap rapat, cukup vokal dan potensial.

Bahkan, kata Agung, Abdullah Azwar Anas ini termasuk anggota yang rajin melakukan interupsi saat berlangsungnya Rapat Paripurna.

Agung sangat menghargai karya tulis yang dihasilkan Anas, dan perjuangannya bagi Negara dan bangsa ini. "Janganlah pernah berhenti, walaupun tidak terpilih lagi menjadi anggota legislatif pada periode mendatang," pinta Agung.

Menurut Agung, buku yang berjudul "Mengawal Negara Budiman" sangat penting dibaca, karena banyak menceritakan perjalanan dan pengalaman Anas sebagai anggota legislatif.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, Abdullah merupakan salah satu putra terbaik dan potensial dari FKB. Tidak terpilihnya dia menjadi anggota legislatif, menurut Muhaimin, tentunya tidak perlu disesali karena menjadi anggota selama lima tahun dengan potensi yang membanggakan sama dengan menjadi anggota dewan selama dua puluh lima tahun.

Senada dengan itu, Ida Fauziah dari fraksi yang sama juga menyampaikan kebanggaannya akan prestasi yang diraih Abdullah. Bahkan, dengan berseloroh Ida mengatakan, di komisi manapun Anas selalu menjadi salah satu inisiator, baik untuk hak angket haji, hak angket BBM, BLBI dan masih banyak lagi prestasi lainnya.

Buku setebal 269 halaman itu merupakan kelanjutan dari pertanggung jawaban Azwar Anas kepada publik selama menjadi anggota dewan. Buku ini juga berisikan rekam jejak selama Azwar Anas menjadi anggota MPR/DPR RI periode 2004-2009. (Tuti)

Kesan AM Fatwa: "Alhamdulillah, Bisa Menjaga Kebersamaan"

Jurnal MPR (30/9). Segenap pimpinan MPR yang terdiri atas ketua dan wakil ketua akan segera mengakhiri masa jabatannya dalam sehari terakhir. Tapi bagi Wakil Ketua MPR AM Fatwa, akhir masa jabatan ini bukan berarti akhir dari pengabdian kepada bangsa dan negara. "Bagi saya, menjadi politisi itu panggilan jiwa, bukan profesi," katanya dalam sambutan peluncuran bukunya yang berjudul "Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1946" di Gedung Nusantara IV.

Selama menjabat sebagai wakil ketua, AM Fatwa juga merasa bersyukur bisa menjaga kebersamaan dengan pimpinan MPR yang lain. "Alhamdulillah dengan tenang kami bisa pelihara kebersamaan yang sudah terjalin selama ini,"ujarnya. Itulah kesan yang paling mendalam selama dia berkiprah sebagai wakil ketua, yang secara internal mendapat tugas sebagai Koordinator Kemajelisan.

Kunci dari kebersamaan itu, kata Fatwa, adalah pengalaman hidup yang sudah dia jalani selama ini. Sebab sejak kecil Fatwa sudah bergaul di lingkungan masyarakat dan mengalami banyak sekali pasang surut kehidupan. Hal itu rupanya menjadi modal untuk bersikap arif dalam memimpin MPR. Bahkan di usianya yang sudah menapaki 70 tahun lebih, dia semakin tenang dan selalu ingin menjaga keharmonisan dengan pimpinan yang lain.

"Saya diangkat sebagai wakil ketua dengan semangat kolegialitas dan kebersamaan," ujarnya. Tapi dalam soal prinsip dan berpegang pada kebenaran dia mengaku tidak takut sekali pun berseberangan dengan pihak lain. Selama proses amandemen UUD 1945, misalnya, Fatwa berani menggebrak meja atau berdiri dari kursi. Setelah selesai amandemen, kemudian dilakukan sosialisasi ke berbagai pelosok di tanah air. Sebagian ada yang memberi kritikan. "Tapi amandemen itu satu keniscayaan, berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat," ujarnya.

Setelah nanti tidak menjabat sebagai wakil ketua MPR, Fatwa akan mencalonkan diri sebagai ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Visi dan misinya adalah menjaga keharmonisan antara anggota DPD dan DPR yang dia sebut "adik kakak". Fatwa juga ingin menjembatani pembangunan di daerah dan pusat. (Iman Firdaus)

Ir.H.Marwan Batubara,M.Sc.

Perlu Ada Sistem Tepat Mengukur Kinerja MPR

Jurnal MPR (29/09). Berbicara tentang kinerja atau mengukur kinerja MPR masa bakti 2004 -2009 ini tidak bisa langsung secara obyektif, karena semua mengukur melalui kinerja dalam melaksanakan tugas. Tolak ukur MPR dalam mengukur kinerjanya adalah sesuai dengan UUD, misalnya menetapkan dan membuat UUD, melantik presiden atau memproses kalau ada *impeachment*. "Kalau faktor-faktor yang disebut tidak ada menjadi terlalu dini untuk mengukur kinerja MPR," kata Ir. H. Marwan Batubara, Msc, anggota MPR RI dari unsur DPD asal DKI Jakarta.

Ketika diminta komentarnya tentang kinerja MPR periode ini, Marwan menilai apakah dengan sistem yang sekarang ini sudah tepat untuk membuat ukuran, atau belum. "Jika sudah tepat harus dijalankan secara serius. Kalau memang dirasakan belum tepat dan masih perlu pengkajian, perlu adanya unsur perubahan dalam sistem sehingga pengukuran kinerja menjadi tepat dan obyektif," katanya.

"Sebagai pembanding sistem *joint session* Amerika. Itu saya rasa bagus juga untuk sebagai bahan pertimbangan untuk diadopsi. Tapi, ini hanya saran. Jangan sampai kita mengada-ngada soal pengukuran kinerja," ujar Marwan.

Lebih jauh Marwan mengingatkan, sepanjang tidak ada unsur perubahan atau perbaikan, kinerjanya mungkin tidak terlihat secara luas. "Apakah kita perlu ada *impeachment* supaya terlihat? Tidak akan sejauh itulah. Kita juga tidak menginginkan *impeachment,"*katanya. "Kita semua berharap siapa pun Presiden Indonesia mampu menjalankan tugas dengan baik dan amanah, dan kita berusaha melakukan sesuatu yang penting untuk pengukuran kinerja," tambah Marwan.

Tentang status dan kuantitas pimpinan MPR RI, Marwan mengungkapkan, status dan kuantitas pimpinan yang sudah ada saat ini sudah bagus. Dengan pembagian pimpinan secara adil empat orang pimpinan, dua dari unsur DPD dan dua dari unsur DPR.

"Di sini kita bicara tentang kesetaraan lembaga, kalau saya dari DPD melihatnya karena dalam UUD itu disebutkan bahwa MPR itu terdiri dari anggota bukan terdiri dari lembaga. Itu artinya *treatment* terhadap anggotanya harus *fair*, ya anggota DPR maupun DPD empat (dua dua) itu sudah oke, kalau sampai lebih menurut saya akan tidak efektif," ungkap Marwan.

Begini saja, semua aturan di MPR, termasuk pimpinan kan sudah ada UU nya. Kalau mau ada perubahan ya harus diadakan *judicial review*. Kita lihat saja nanti arahnya," terang Marwan. (Derry Irawan)

Minim Tepuk Tangan

Jurnal MPR (30/9). Sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan Tahun 2004-2009 sangat minim tepuk tangan. Tidak kurang dari tiga kali tepuk tangan dari 341 anggota MPR yang hadir dari 678 anggota MPR seluruhnya pada sidang paripurna itu.

Tepuk tangan pertama terjadi ketika Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla memasuki ruang sidang didampingi Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua A.M. Fatwa, Aksa Mahmud, dan Hj. Mooryati Soedibyo. Sambil tersenyum dan melambai-lambaikan tangan, Jusuf Kalla membalas tepukan tangan anggota MPR. Sepanjang Ketua MPR Hidayat menyampaikan laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan Tahun 2004-2009 sama sekali tak terdengar tepuk tangan dari anggota MPR. Anggota MPR secara serius menyimak laporan Pimpinan MPR. Namun, masih ada anggota DPR yang tertidur saat mendengar laporan kinerja Pimpinan MPR.

Baru menjelang akhir penyampaian laporan terdengar lagi tepuk tangan, yaitu pada saat Hidayat Nur Wahid mengucapkan pantun di akhir penyampaian laporan kinerja. Anggota DPR kembali tepuk tangan setelah sidang paripurna ditutup. Jumlah tepuk tangan ini sangat jauh berbeda saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato di tempat sama beberapa waktu lalu yang mendapat belasan tepuk tangan dari anggota dewan. (Budi Sucahyo)

Pantun Penutup Sidang

Dalam masyarakat Indonesia pantun sering digunakan untuk berbagai acara, seperti misalnya untuk meminang. Dalam pantun ditemukan kata-kata sopan penuh tuntunan. Saat Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menutup Sidang MPR akhir masa jabatan tahun 2004-2009, dia pun membacakan pantun sebagai penutup acara, yang berbunyi:

Berlayar gagah pelaut Bugis
Berdiri megah candi Prambanan
Berharap saat Paripurna habis,
Mencintai Indonesia makin dikuatkan
Indah nian Tari Serimpi
Cukup Sekian Terimakasih

Kontan, sejumlah anggota yang sejak awal mendengar dan sebagian tidak perhatian dengan laporan itu menjadi terpana, dan tiba-tiba bertepuk tangan. (Iman Firdaus).

Pamdal Siap Amankan Sidang MPR

Jurn al MPR (30/9). Dalam sidang akhir masa jabatan MPR RI Periode 2004-2009, sektor keamanan yang dikendalikan oleh Pamdal MPR akan mengerahkan keamanan sebanyak 1.615 personil. Personil sebanyak itu menurut Kabag Keamanan MPR Drs Riskandar, terdiri dari Pamdal MPR sebanyak 30 personil, DPD 35 personil, DPR 450 personil, Polda Metro Jaya 1000 personil, dan 100 anggota Paspampres.

Persiapan untuk mengamankan sidang masa akhir jabatan ini diakui sudah dipersiapkan selama satu tahun. Selama satu tahun itu dicari mekanisme pengamanan yang sesuai dengan prosedur. "Kami sudah melakukan rapat-rapat dengan instansi lain sejak setahun yang lalu," ujar Riskandar. Selama satu tahun itu, ia berkoordinasi dengan jajaran samping, yakni Pamdal DPR dan Pamdal DPD. Kemudian dengan pihak Polda Metro Jaya, yakni unsur Karo Ops, Dirlantas, dan Direktur Intelejen. Sedang dengan TNI dari Kodam Jaya dan Paspampres. Dari pihak Pamdal DPR dan DPD sendiri diakui oleh Riskandar sudah siap untuk saling bantu dan mem-back up. Diantara mereka sendiri sebelumnya sudah saling bantu bila saling memerlukan.

Untuk memperlancar proses keluar masuk orang di kompleks gedung, pihak pamdal pun mengeluarkan sebanyak 17 tanda pengenal untuk Ring I dan 9 tanda pengenal untuk Ring II. Ring dengan model dan warnanya beragam itu nanti akan diberikan kepada masyarakat umumnya yang ingin berpartisipasi dalam masa sidang akhir jabatan dan diberikan kepada anggota MPR khususnya.

Tugas pamdal sendiri menurut Riskandar adalah mengawal anggota MPR, memberikan pelayanan kepada anggota, dan mengamankan asset milik MPR. Dijelaskan ring-ring pengamanan yang ada, yakni Ring I meliputi Gedung Nusantara, Ring II mencakup seluruh komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Ring III luar kompleks gedung, dan Ring IV di luar luar kompleks gedung. "Nah kalau ada demonstrasi itu menjadi urusan polisi karena berada di Ring III," ujarnya. Sementara bila hadir presiden dan wakil presiden, Riskandar mengungkapkan keamanan pada kedua pemimpin negara itu diserahkan kepada paspampres.

Ketika ditanya soal apakah ada demonstrasi saat sidang akhir masa jabatan, Riskandar mengatakan belum ada tanda-tanda muncul demonstrasi. Namun pihaknya siap mengantarkan dan membantu demonstrasi bila memang diterima. Pihak pamdal MPR sendiri sudah menyatakan diri kesiapannya untuk mengamankan jalannya sidang akhir masa jabatan. "Harga mati sidang akhir masa jabatan MPR harus aman," ujarnya dengan mantap.(Ardi Winangun)

Pos Kesehatan I

Sakit bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Termasuk saat sedang mengikuti Sidang MPR akhir masa jabatan tahun 2004-2009, yang berlangsung di Gedung Nusantara, Selasa (29/09) kemarin. Sebelum masuk ke ruang sidang, anggota MPR RI dari unsur DPR RI dari Partai Golkar Idrus Marham tampak berkonsultasi dengan dokter di Pos Kesehatan I yang terletak di lantai bawah dekat pintu masuk. "Saya batuk," kata Idrus, Ketua KNPI sambil membetulkan jasnya dan tidak jadi ikut menghadiri sidang.

Pos Kesehatan I tampak dijaga dua petugas dan seorang dokter. Menurut salah seorang tenaga paramedis, mereka sudah berjaga sejak Senin, 28/09 lalu. Mereka akan bertugas hingga tanggal 2 Oktober.

Selain tenaga medis, di pos tersebut juga disediakan berbagai obat-obatan untuk para anggota majelis yang tiba-tiba terserang sakit. Termasuk tersedia beberapa alat kesehatan seperti alat pendeteksi tekanan darah dan kasur tempat membaringkan pasien.

Untuk perhelatan seperti sidang paripurna MPR ini, kesigapan tenaga medis memang diperlukan. Sebab dalam persidangan yang kadangkala berlangsung alot dan berlarut-larut, tenaga dan pikiran biasanya terkuras habis. (Iman Firdaus)

Foto Lucu Haji Komar

Bertemu dengan tokoh yang disenangi memang sayang bila tak dimanfaatkan untuk foto bareng. Hal itu terlihat saat Haji Komar (anggota MPR unsure DPR/ Partai Demokrat) datang ke acara pidato Ketua MPR akhir masa jabatan tahun 2004-2009, Selasa (29/09). Meski datang terlambat, Haji Komar tidak buru-buru masuk ke ruang sidang. Hal itu karena sebagian petugas absensi di depan pintu masuk Gedung Nusantara meminta Haji Komar foto bareng.

Kesempatan ini tak disia-siakan. "Hayo, siapa lagi yang mao foto sama saya?" tantang Haji Komar. Dan yang membuat hadirin tersenyum adalah setiap kali difoto, mimik muka Komar dibuat melucu sehingga yang memandang pun tertawa-tawa.(Iman Firdaus)

Salah Jalan Bikin Tertawa Orang

Sebelum Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI Periode 2004-2009 berakhir, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mempersilakan kepada Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa untuk memimpin doa penutup. Begitu dipersilahkan, A.M. Fatwa pun beranjak dari kursi pimpinan sidang menuju ke mimbar. Mimbar itu tepatnya berada di bagian kiri di depan meja sidang.

Dengan langkah yang mantap ia pun menuju mimbar itu, seluruh anggota MPR yang hadir dalam sidang itu beserta seluruh undangan yang lain agak heran ketika ia justru menjauh dari mimbar itu, namun secara tiba-tiba ia berbalik arah menuju mimbar itu. Melihat adegan itu seluruh orang yang berada di Gedung Nusantara termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla tertawa.

Mendengar tertawaan itu, rupanya A.M. Fatwa tetap tenang, dengan khusyuk ia pun memimpin doa. Doa meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah pun dilantunkan. Begitu usai, ia pun turun dari mimbar, orang mungkin berpikiran ia tidak melakukan kesalahan seperti sebelumnya.

Begitu turun dari mimbar ia melangkah, orang berpikir mungkin A.M. Fatwa akan memutar untuk menuju meja sidang, sehingga ia kelihatan menjauhi meja sidang, namun setelah beberapa langkah ia secara mendadak berbalik menuju meja sidang melalui jalan yang sama saat hendak memimpin doa. Melihat adegan seperti seluruhnya tertawa terbahak-bahak, sebab seolah-olah ia melakukan kesalahan yang kedua kalinya.

Melakukan salah langkah itu tidak membuat A.M. Fatwa menjadi malu. Selepas menghantar Jusuf Kalla, ia tidak lepas dari tertawanya mengenang peristiwa itu. Menurutnya kejadian itu bisa terjadi karena selama ini ia sudah terbiasa memimpin sidang, namun kalau berbicara di mimbar ia tidak pernah. Sehingga ketika menuju ke mimbar ia mengikuti tangga yang ada, tangga yang ada rupanya membuat dirinya salah langkah dan membuat adegan yang lucu. "Ha.. ha.. ha.." terdengar ketika ditanya peristiwa itu.

Sebenarnya seluruh pimpinan diberi waktu untuk mengikuti gladi kotor Sidang Akhir Masa Jabatan, namun karena sesuatu hal dirinya tidak ikut. A.M. Fatwa diberi kepercayaan memimpin doa karena kesepakatan pimpinan MPR. Sebelumnya di MPR ada 2 kiai yang biasa memimpin doa, entah karena apa urusan doa akhirnya diamanatkan kepadanya. Namun amanat itu rupanya menjadi berkah, kelucuan yang terjadi membuat suasana sidang menjadi cair dan ada hiburan. "Ha.. ha.. ha… Sengaja tetapi sekaligus membikin lucu," aku pria asal Sulawesi Selatan itu. (AW)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
————————

PIDATO KETUA MPR RI
DALAM SIDANG MPR AKHIR MASA JABATAN
TAHUN 2004-2009

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2009

***Assallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*,**
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati,

- Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, DR.(HC.) H. Muhammad Jusuf Kalla; beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla;
- Saudara-saudara Wakil Ketua MPR;
- Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara;
- Saudara-saudara Anggota MPR;
- Saudara-Saudara Menteri Anggota Kabinet Indonesia Bersatu;
- Saudara Istri dan Suami Anggota MPR;
- Hadirin dan hadirat, undangan yang berbahagia.

Sesuai catatan yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini ***alhamdulilah*** daftar hadir telah ditandatangani oleh ……... Anggota MPR dengan perincian:

- Fraksi Golongan Karya ……... dari 143 anggota;
- Kelompok Anggota DPD …….dari 128 anggota;
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan … dari 122 anggota;
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan …..dari 58 anggota;
- Fraksi Demokrat ….. dari 60 anggota;
- Fraksi Partai Amanat Nasional ……... dari 53 anggota;
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ……..dari 52 anggota;
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ….. dari 45 anggota; dan
- (*Fraksi Partai Bintang Pelopor Reformasi*) ……...dari 17 anggota.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucap *bismillahirahmanirrahim*, Rapat Paripurna dengan agenda tunggal **Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan 2004-2009 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum**.

***Saudara-saudara Anggota MPR dan hadirin yang kami hormati*,**
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadlirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, bangsa Indonesia, sehingga sampai hari ini, Selasa 29 September 2009 kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus menunaikan tugas dan pengabdian kita dalam menjalankan amanat rakyat, bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

Terimakasih yang setulus-tulusnya sekaligus selamat datang juga kami sampaikan kepada Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara, Anggota Majelis beserta Suami/Istri, Saudara-saudara Menteri Anggota Kabinet Indonesia Bersatu serta hadirin/hadirat yang telah berkenan untuk menghadiri undangan kami dalam sidang Paripurna MPR Sidang Akhir Masa Jabatan di gedung Nusantara MPR ini.

Masih dalam suasana *Idul Fithri*, kepada hadirin dan seluruh rakyat Indonesia, kami atas nama Pimpinan Majelis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fithri 1430 H, mohon maaf lahir dan batin, semoga makna *Idul Fithri* tahun ini

membawa keberkahan bagi kita untuk kuatkan komitmen kembali kepada fitrah kita sebagai bangsa yang melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara jujur, baik dan benar dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi dan agenda reformasi.

***Sidang Majelis yang terhormat*,**

Selanjutnya Ijinkanlah kami menyampaikan **Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan 2004-2009**.

Salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk merealisasikan demokrasi dan mewujudkan tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan yang lebih baik adalah dengan melaksanakan reformasi konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan dari tahun 1999 hingga tahun 2002.

Sebagai salah satu agenda utama reformasi, amandemen konstitusi telah menguatkan demokrasi dan mengubah tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan melalui penataan ulang lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan pengaturan yang lebih tegas dan lebih luas dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara.

Diantara perubahan penting dan mendasar dalam reformasi konstitusi adalah terkait dengan **"lembaga MPR"**. MPR tidak lagi menjadi lembaga yang melaksanakan **"sepenuhnya"** kedaulatan rakyat. Karena setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Implikasi dari itu, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, pembuat GBHN, tetapi menjadi lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Meskipun kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, namun UUD NRI Tahun 1945 masih menegaskan bahwa tugas dan kewenangan MPR saat ini tetap terkait dengan norma fundamental yang tertinggi dalam negara yaitu konstitusi negara, sumber rujukan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hanya MPR yang diberi wewenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945), bahkan Undang Undang Susduk MPR,DPR,DPD, dan DPRD Pasal 8 ayat (1) huruf d menugaskan Pimpinan MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945.

Kewenangan MPR juga tetap terkait dengan yang tertinggi di bidang eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk pelantikannya, bahkan secara eksplisit UUD NRI Tahun 1945 memberi kewenangan baru bagi MPR yaitu memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B). Secara eksplisit UUD NRI Tahun 1945 juga memberi kewenangan baru bagi MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap; memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden; serta memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 8).

Selain itu UUD NRI Tahun 1945 juga menghadirkan komposisi keanggotaan yang baru bagi MPR. Karena mulai periode 2004-2009 ini anggota MPR tidak ada yang diangkat tetapi semua anggota MPR dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Demikian pula dengan komposisi Pimpinan MPR periode 2004-2009 yang menghadirkan komposisi yang jumlahnya terkecil sepanjang sejarah MPRS/MPR. Jumlah Pimpinan MPR pada masa orde lama 5 orang, 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua, masa orde baru 6 orang, 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua, dan pada awal masa reformasi jumlah Pimpinan MPR mencapai 9 orang dengan 1 Ketua dan 8 Wakil Ketua. Kini, sesuai dengan Undang-Undang Susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD Pasal 7 ayat 1, Pimpinan MPR hanya 4 orang saja dengan 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua.

***Sidang Majelis yang terhormat*,**

Mencermati konstruksi kelembagaan MPR tersebut, maka mudah disimpulkan bahwa MPR adalah lembaga yang konstitusional, permanen, independen dan mempunyai kedudukan, susunan kepemimpinan dan keanggotaan, tugas dan kewenangan yang khas dan berbeda dengan lembaga lembaga negara lainnya. Namun menjadi sebuah kenyataan sejarah bahwa pada periode ini juga muncul polemik yang menginginkan agar MPR dijadikan Lembaga *Joint Session* antara DPR dan DPD, serta pimpinannya dijabat secara *Ad Hoc* oleh Pimpinan DPR dan DPD. Sesuatu yang tidak terealisasi sampai dengan berakhirnya kepemimpinan MPR Periode 2004 – 2009, selain memang UUD tidak bersemangat *Joint Session* dan *ad hoc*, bahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD justru menegaskan tentang independensi dan eksistensi Lembaga MPR dan Pimpinannya.

Memang sebagai lembaga parlemen, MPR berada dalam satu rumpun kekuasaan legislatif dengan lembaga DPR dan DPD, namun UUD NRI Tahun 1945 Pasal 9 ayat 2 secara eksplisit menegaskan tentang keberadaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuatu yang tidak disebutkan untuk Pimpinan DPR maupun Pimpinan DPD. Keberadaan MPR sebagai lembaga perwakilan adalah suatu yang *unik* dan khas dalam sistem ketatanegaran Indonesia yang membedakan dengan sistem ketatanegaraan negara lain.

Seiring dengan dinamika konstitusi, demokrasi dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, MPR dan Pimpinan MPR masa jabatan tahun 2004-2009 telah berupaya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berperan serta dalam mendorong lebih lanjut praktek demokrasi konstitusional demi terwujudnya kualitas kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan untuk merealisasikan cita-cita proklamasi dan amanat reformasi sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya.

Oleh karena itu, sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h dan Pasal 406 dan 407 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR, serta kesepakatan aklamasi dalam rapat gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok Anggota DPD di MPR pada tanggal 11 September 2009, Pimpinan MPR masa jabatan 2004-2009 menyusun laporan kinerja Pimpinan yang sekarang ini disampaikan dalam Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan. Dan untuk mendapatkan masukan dalam rangka menghadirkan suatu laporan kinerja yang komprehensif, Pimpinan MPR dalam mempersiapkan laporan kinerjanya juga dibantu oleh suatu Tim yang merupakan perwakilan representatif dari setiap Fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR.

***Sidang Majelis yang terhormat*,**

Tugas dan wewenang MPR dan Pimpinan MPR masa bhakti 2004-2009 merujuk pada landasan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD serta Peraturan Tata Tertib MPR.

Beragam kegiatan penting ke-MPR-an selama kurun waktu lima tahun telah dilaksanakan oleh Pimpinan MPR RI sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan ke-MPR-an periode 2004-2009 dimulai dengan pelantikan Anggota MPR, pembentukan Fraksi dan Kelompok Anggota MPR, pemilihan Pimpinan MPR, pengesahan Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2004 - 2009 hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Kegiatan untuk melantik anggota MPR masa bhakti 2004-2009 telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR telah melantik 678 Anggota MPR yang terdiri dari 550 anggota DPR dan anggota DPD yang masing-masing telah diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 137/M tahun 2004, tanggal 23 September 2004.

Kegiatan ke-MPR-an berikutnya adalah Pembentukan Fraksi dan Kelompok Anggota MPR. Fraksi dan Kelompok Anggota MPR dibentuk untuk meningkatkan dayaguna kerja Majelis dan Anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dan daerah . Pasal 14 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR menyatakan bahwa "Setiap Anggota Majelis wajib menjadi anggota salah satu fraksi atau kelompok anggota sesuai dengan unsurnya." Fraksi dan kelompok anggota MPR masa jabatan 2004-2009 telah ditetapkan dengan Keputusan MPR Nomor 10/MPR/2004, yang berjumlah 9 fraksi dan kelompok Anggota, terdiri dari 8 fraksi yang mencerminkan konfigurasi partai politik dan 1 kelompok anggota yang mencerminkan keanggotaan DPD. Pada perkembangannya jumlah Fraksi berkurang menjadi 7 Fraksi saja, karena ada 1 Fraksi yang tidak lagi memenuhi syarat minimal pembentukan Fraksi, sehingga sampai akhir masa jabatan MPR periode 2004-2009, Fraksi yang ada di MPR adalah F-PG, F-PDIP, F-PD, F-PPP, F-PAN, F-KB, F-PKS dan Kelompok Anggota DPD.

Agenda MPR berikutnya adalah pemilihan Pimpinan MPR, sebuah alat kelengkapan yang akan memimpin MPR yang merupakan suatu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Dengan berbagai dinamika perdebatan yang mewarnai baik melalui rapat pimpinan maupun rapat gabungan, termasuk adanya usul perubahan Peraturan Tata Tertib MPR terkait dengan tata cara pemilihan Pimpinan MPR, maka pemilihan Pimpinan MPR 2004-2009 dilaksanakan dengan melalui sistem paket. Pemilihan Pimpinan MPR masa jabatan 2004-2009 dengan sistem paket memunculkan dua paket calon, dari Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan.

Berdasarkan perolehan suara yang didapat melalui pemilihan terbuka dan demokratis tersebut maka Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terpilih adalah Paket B, Koalisi Kerakyatan yang mencalonkan Dr. M. Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR),Drs H. AM Fatwa (Wakil Ketua MPR) , H Muhamad Aksa Mahmud (Wakil Ketua MPR), dan Hj. B.R.A. Mooryati Soedibyo (Wakil Ketua MPR). Pimpinan MPR masa jabatan tahun 2004-2009 kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna MPR pada tanggal 6 Oktober 2004 dan ditetapkan dengan Keputusan MPR Nomor 14/MPR/2004, tanggal 6 Oktober 2004. Sebelum melaksanakan tugasnya, Pimpinan MPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H. dalam Sidang Paripurna MPR, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan MPR masa jabatan tahun 2004-2009.

Agenda MPR berikutnya yang juga sangat penting pada tahun 2004 adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2004. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, telah menghadirkan pasangan calon Soesilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak sehingga ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih masa jabatan 2004-2009.

Sesuai hasil rapat gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota MPR tanggal 18 Oktober 2004, maka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 82 Peraturan Tata Tertib MPR. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan pengucapan sumpah/janji menurut agama Islam dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2004.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, menghadirkan nuansa baru, untuk pertama kalinya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara-negara sahabat, antara lain Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia John Howard, dan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, Perdana Menteri Singapura

Lee Hsien Loong, serta utusan khusus negara-negara sahabat seperti Jepang, Korea Selatan, Belanda, Philipina, Thailand, dan Vietnam.

Sidang Majelis yang terhormat,

Terkait dengan kewenangan MPR untuk menetapkan dan merubah UUD NRI Tahun 1945, kita patut bersyukur bahwa MPR periode 1999-2004 telah berhasil menyelesaikan agenda perubahan UUD 1945, tetapi seiring dengan dinamika demokrasi dan perkembangan kesadaran warga negara akan hak-haknya, lahir pula-lah berbagai tuntutan masyarakat yang salah satunya adalah kehendak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Di lain pihak juga terdapat usulan untuk melakukan perubahan kembali terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut kami perlu menyampaikan bagaimana sikap Pimpinan MPR mengelola dinamika dan usulan perubahan dan wacana yang mengemuka disekitar isu amandemen kembali terhadap perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas.

Usul perubahan kembali UUD NRI Tahun 1945 banyak dicetuskan beberapa kalangan. Beberapa pendapat mengenai perlunya dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar dikelola oleh Pimpinan MPR sesuai kewenangannya sebagai bagian daripada dinamika berdemokrasi, dan sebagai bentuk masukan bagi MPR mengenai hal-hal yang perlu untuk diperhatikan khususnya terkait dengan materi perubahan kembali UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian Pimpinan MPR juga selalu mengingatkan kepada semua pihak bahwa Pimpinan MPR tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk mempunyai hak prerogratif untuk menetapkan maupun merubah Undang-Undang Dasar. Karenanya semua pihak diingatkan untuk betul-betul menaati ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri, misalnya ketentuan Pasal 37 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan da-lam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Menyikapi adanya berbagai wacana untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Pimpinan MPR sebagai alat kelengkapan MPR tetap bersikap netral, tidak menghalang-halangi tapi juga tidak memprovokasi dan tetap mengelola dengan konsisten mengedepankan ketentuan konstitusi secara utuh dan berpijak pada landasan konstitusional yang diatur dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Tata Tertib MPR.

Usul perubahan kembali terhadap UUD NRI Tahun 1945 antara lain diprakarsai oleh anggota MPR dari Kelompok DPD sebagaimana yang mereka ajukan pada tanggal 9 Mei 2007 dengan surat Nomor DN. 190/1/DPD/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 perihal Usul Perubahan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, dengan jumlah pengusul sebanyak 238 Anggota MPR. Dalam perkembangannya terjadi dinamika penambahan dan penarikan dukungan usul perubahan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, sehingga pada saat diselenggarakan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di MPR tanggal 22 Mei 2007, jumlah pengusul berkurang menjadi sebanyak 228 Anggota MPR.

Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR tanggal 22 Mei 2007, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib MPR, menyepakati batas waktu penambahan dan penarikan dukungan terhadap usulan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yaitu selama 90 hari sejak diterimanya usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yakni terhitung mulai tanggal 9 Mei 2007, sehingga batas akhir penambahan dan penarikan dukungan usulan perubahan tersebut jatuh pada tanggal 7 Agustus 2007 pukul 00.00 WIB.

Sampai tanggal 7 Agustus 2007 pukul 19.00 WIB, sebelum akhirnya Pimpinan Kelompok DPD di MPR yang mengatasnamakan para pengusul Perubahan, menyampaikan surat kepada Pimpinan MPR yang menyatakan belum meneruskan proses usul Perubahan UUD NRI 1945, ternyata jumlah dukungan terhadap usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22D hanyalah sebanyak 216 Anggota MPR, sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 37 ayat (1), yaitu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Anggota MPR atau sekurang-kurangnya sebanyak 226 anggota MPR. Mempertimbangkan hal itu semuanya Pimpinan MPR dalam Rapat Pimpinan pada jam 20.00 WIB tanggal 7 Agustus 2007 memutuskan untuk belum dapat mengundang Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR dengan agenda Perubahan UUD NRI 1945 karena belum adanya usulan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, sekalipun pernah muncul dinamika terkait dengan usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945, sampai dengan berakhirnya "Periode 2004 – 2009", UUD NRI Tahun 1945 tidak mengalami perubahan satu ayatpun.

Sidang Majelis yang terhormat,

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pimpinan MPR masa jabatan tahun 2004-2009 melaksanakan tugas dan kewenangan antara lain : memimpin sidang-sidang dan rapat-rapat Majelis. Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara. Selama masa jabatan tahun 2004-2009, Pimpinan Sementara MPR telah memimpin Sidang Majelis untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk alat kelengkapan Majelis, serta meresmikan keanggotaan Majelis hasil pemilihan umum tahun 2004. Selain sidang tersebut Pimpinan tetap MPR juga sudah berhasil memimpin Sidang Paripurna MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2004, serta menyelenggarakan Sidang Akhir Masa Jabatan masa jabatan 2004-2009 sebagaimana yang berlangsung saat ini.

Selama masa bhakti 2004-2009, Majelis hanya memiliki Pimpinan Majelis sebagai alat kelengkapannya, sedangkan alat kelengkapan lain seperti Badan Kehormatan belum dibentuk. Pimpinan MPR menyatakan tentang perlunya pembentukan Badan Kehormatan MPR, namun demikian dalam rapat gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota MPR disepakati bahwa pembentukan Badan Kehormatan MPR memerlukan kajian dan telaahan yang mendalam dengan memperhatikan kedudukan anggota MPR yang berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, dimana masing-masing lembaga tersebut telah memiliki Badan Kehormatan tersendiri, sehingga sampai dengan akhir masa jabatan, Badan Kehormatan MPR belum dibentuk.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD Pasal 8, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Pimpinan MPR melakukan pembagian tugas, Wakil Ketua MPR, A.M. Fatwa sebagai koordinator bidang Materi Kemajelisan MPR, Wakil Ketua MPR H.M. Aksa Mahmud sebagai koordinator bidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran MPR RI, Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo sebagai koordinator bidang Kebijakan Kerumahtanggaan MPR. Sedang Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mempunyai tugas yang bersifat umum yang melingkupi semua bidang koordinasi. Selain itu Pimpinan MPR juga menyelenggarakan rapat-rapat MPR untuk melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas Pimpinan MPR. Pimpinan MPR telah menyelenggarakan Rapat Pimpinan MPR sebanyak 63 kali rapat dan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR sebanyak 14 kali rapat. Pertemuan Konsultasi dengan Presiden maupun dengan Pimpinan Lembaga Negara lain juga dilakukan untuk membahas isu-isu nasional yang penting dan strategis terkait dengan tugas dan kewenangan MPR, yang dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan, dan rapat-rapat lainnya sebanyak 44 kali.

Pimpinan MPR juga menerima kunjungan kenegaraan delegasi dari negara-negara sahabat, maupun kunjungan Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Parlemen, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, LSM, Media Massa, maupun dari Civitas Akademika. Selama masa jabatannya, Pimpinan MPR telah menerima kunjungan sebanyak 754 kali dengan berbagai macam agenda kunjungan. Kunjungan kenegaraan ke berbagai negara juga dilakukan dalam rangka memenuhi undangan, melaksanakan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR kepada masyarakat Indonesia di luar negeri, mengenalkan praktek berdemokrasi di Indonesia dan memperkokoh hubungan antar negara dengan memperkokoh hubungan antar lembaga-lembaga demokrasi.

***Sidang Majelis yang terhormat*,**

Kendala-kendala dalam penyelenggaraan ketatanegaraan bukan semata-semata disebabkan karena ketidaksempurnaan UUD, namun juga belum dilaksanakannya UUD NRI 1945 secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh komponen bangsa. Untuk merealisasikan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 jelas membutuhkan pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai UUD NRI 1945 tersebut. Pemahaman yang utuh terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga dimaksudkan agar UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan dasar yang mengkaidahi perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak hanya dipahami teks-nya saja tetapi juga dalam tataran konteks-nya, sehingga secara utuh dan menyeluruh kita juga memahami latar belakang, proses, maupun suasana batin pada saat norma-norma yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 itu ditetapkan. Pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga dimaksudkan agar UUD NRI Tahun 1945 tidak ditafsirkan secara salah, sempit dan berbeda-beda, agar dalam implementasinya pun tidak berbeda-beda pula, karena apabila hal itu terjadi, UUD NRI Tahun 1945 hanya akan menjadi sebuah cita-cita luhur belaka, namun tidak diimplementasikan sebagaimana semestinya dan sebenarnya.

Terkait dengan upaya peningkatan pemahaman UUD NRI Tahun 1945 yang di dalam pembukaannya juga mengandung sila-sila Pancasila, ijinkanlah kami menyampaikan salah satu pelaksanaan tugas Pimpinan MPR selama kurun waktu 2004-2009 yaitu sosialisasi UUD NRI Tahun 1945. Mengingat pentingnya sosialisasi dan dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas Pimpinan MPR yang diamanatkan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR, Pimpinan MPR telah membentuk Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR yang anggotanya berjumlah 70 orang, yang mewakili secara proporsional unsur Fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR yang bersama Pimpinan MPR menyusun materi dan metode, serta melaksanakan sosialisasi putusan MPR. Tim kerja ini ditulangpunggungi oleh anggota MPR yang dulu pernah terlibat langsung dalam proses dan praktek amendemen UUD 1945. Tim Kerja dibagi dalam 2 Sub Tim Kerja, yaitu Sub Tim Kerja I, yang membidangi Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dipimpin oleh Ir. Pataniari Siahaan dari F-PDIP, dan Sub Tim Kerja II, yang membidangi Ketetapan MPRS/MPR yang dipimpin oleh Drs. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. dari F-PG.

Memasyarakatkan atau lebih dikenal dengan istilah sosiali-sasi putusan MPR terse-but, selain merupakan perintah undang-undang, juga dipandang penting karena walaupun MPR telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dan peninjauan Ketetapan MPRS dan MPR, yang merupakan putusan MPR terpenting, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat termasuk para pengambil keputusan di negara ini, belum memahami dengan baik dan benar UUD NRI Tahun 1945. Padahal kualitas kehidupan bernegara jelas sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengamalan penyelenggara negara dan warga masyarakat atas konstitusinya.

Dalam kaitan inilah, sosialisasi putusan MPR selain dilaksanakan di internal MPR, juga ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk di kalangan pejabat negara dan aparatur pemerintah untuk memberikan pe-mahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai UUD NRI Tahun 1945 serta kedudukan, status hukum, dan masa depan Ketetapan MPRS/MPR.

Pemasyarakatan Putusan MPR memperoleh apresiasi positif dari Pemerintah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 15 April 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 oleh MPR. Apresiasi positif juga muncul dari para peserta sosialisasi dari berbagai kelompok sasaran seperti sosialisasi di Departemen/Instansi, Provinsi, Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan, sekalipun demikian tentu saja ada yang mengkritisi metoda dan efektifitas sosialisasi, untuk itulah pada setiap akhir tahun program Pimpinan MPR bersama dengan Pimpinan Tim kerja sosialisasi putusan MPR melakukan evaluasi tahunan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas sosialisasi.

Sosialisasi Putusan MPR (UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR) dilaksanakan melalui berbagai metode yaitu pemaparan dan dialog langsung, *Training Of Trainers* (TOT), Sosialisasi Putusan MPR langsung di setiap Provinsi dan Instansi, Dialog Interaktif melalui TVRI dan RRI, Pengiriman materi sosialisasi Putusan MPR ke daerah dan sekolah-sekolah, pelaksanaan Cerdas Cermat Konstitusi Tingkat Nasional bagi siswa SMU, penerjemahan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, serta pendayagunaan media e-demokrasi di *website. www.mpr.go.id.*

a. Sosialiasi di Departemen, Instansi dan Institusi lainnya.

Sosialisasi kepada departemen, instansi maupun institusi pemerintah lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan dengan metoda pemaparan langsung dan dialog terbuka. Bahkan dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional, Pimpinan MPR telah membicarakan secara khusus kemungkinan materi konstitusi masuk dalam kurikulum sekolah sehingga masuk dalam buku ajar untuk dipelajari oleh peserta didik. Untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi putusan MPR di daerah, Menteri Dalam Negeri, Muhamad Ma'ruf, telah menyepakati dengan Pimpinan MPR untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sosialisasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sosialisasi di Departemen/Instansi/Institusi lainnya telah dilaksanakan di 94 Departemen/ Instansi/Institusi lainnya termasuk instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan total jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi adalah sebanyak 15.150 peserta.

b. Sosialisasi Putusan MPR di Provinsi

Sasaran pelaksanaan sosialisasi putusan MPR RI di Tingkat Provinsi adalah unsur MUSPIDA Provinsi, Anggota DPRD dan para guru, terutama guru-guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sosialisasi putusan MPR di tingkat Provinsi memperoleh tanggapan yang positif dan antusias dari para peserta sosialisasi terutama di kalangan para guru. Melalui sosialiasi di tingkat Provinsi diharapkan para aparatur pemerintah daerah provinsi sebagai pelayan masyarakat dapat memahami secara utuh dan menyeluruh mengenai Putusan MPR. Demikian pula para guru diharapkan dapat mensosialisasikan lebih lanjut kepada para peserta didik mengenai putusan MPR. Sosialisasi di tingkat Provinsi telah dilaksanakan di seluruh provinsi (33 Provinsi) dengan jumlah peserta sebanyak 9900 peserta di seluruh Indonesia.

c. Sosialisasi Putusan MPR di Kabupaten/Kota

Mengingat banyaknya jumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, maka teknis pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggabungkan 2 sampai dengan 4 Kabupaten/Kota yang secara geografis berdekatan, namun dalam pelaksanaannya Kabupaten penyelenggara mendominasi sebagain besar jumlah peserta. Sosialisasi di Kabupaten/Kota diikuti oleh unsur Muspida Kabupaten/Kota, Anggota DPRD dan para guru, yang sangat antusias mengikuti kegiatan yang menurut mereka sangat bermanfaat dan membantu mereka dalam mengajar pendidikan kewarganegaraan. Untuk Tingkat Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sosialisasi di 436 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 63.087 orang. Tim Sosialisasi MPR dari Jakarta langsung mendatangi kabupaten/kota tempat penyelenggaraan sosialisasi, mereka rela menempuh perjalanan yang sangat lama, jauh dan penuh dengan resiko keamanan. Ada yang harus transit dibeberapa bandara hingga hampir 20 an jam untuk mencapai kabupaten terpencil di wilayah Papua. Mereka juga melakukan perjalanan darat berjam-jam melintasi hutan untuk sampai ke lokasi sosialisasi di daerah terpencil di Sumatera. Ada juga yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menggunakan kapal motor menyusuri kelokan sungai memasuki pedalaman Kalimantan.

d. Sosialisasi di Universitas/ Perguruan Tinggi

Pelaksanaan sosialisasi Putusan MPR di lingkungan sivitas akademika dipandang penting mengingat lingkungan sivitas akademika sebagai "pilar pembangunan" demokrasi. Sosialisasi ini diikuti oleh kalangan dosen maupun mahasiswa. Selama periode 2004-2009 telah dilaksanakan sosialisasi di Universitas sebanyak 19 Universitas dengan total jumlah peserta sebanyak 3600 orang.

e. Sosialisasi melalui Training *Of Trainers* (TOT) di seluruh Provinsi dan Instansi.

Penyelenggaraan TOT dimaksudkan agar tersedia nara sumber sosialisasi putusan MPR di masing-masing Provinsi/ Instansi sehingga akan mempercepat proses pemasyarakatan putusan MPR ke berbagai kalangan masyarakat. Jumlah peserta TOT di masing-masing Provinsi/Instansi sebanyak 50 orang, yang terdiri dari unsur birokrasi, akademisi, dan organisasi sosial dan politik. Dengan tersedianya para *trainers* di masing-masing Provinsi/

Instansi, diharapkan daerah masing-masing Provinsi dan Instansi dapat secara mandiri menyelenggarakan sosialisasi putusan MPR ke berbagai kalangan masyarakat di daerahnya dengan mendayagunakan para *trainers* di Instansi/ provinsinya sebagai narasumber. Selama masa jabatan Pimpinan MPR 2004-2009 telah dilakukan TOT di 33 Provinsi di seluruh Indonesia dan di 3 Instansi yaitu di Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan nasional dan Institusi Polri, dengan jumlah peserta seluruhnya 2850 peserta.

f. Sosialisasi melalui *Focus Group Discussion* dan Seminar

Kegiatan FGD sebagai salah satu metoda sosialisasi diselenggarakan untuk memperdalam kajian secara akademik mengenai konsepsi dan implementasi pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. FGD diselenggarakan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Kegiatan FGD diikuti oleh para akademisi dari kalangan universitas, yang pada umumnya adalah dosen-dosen dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu sosial Politik. Selama masa jabatan 2004-2009, telah dilaksanakan 10 kali FGD, yang diikuti oleh 320 orang.

g. Sosialisasi melalui Ormas Islam dan Pondok Pesantren

Mengingat nilai penting dan strategis dari Ormas Islam dan Pondok Pesantren, maka Pimpinan MPR pun menyelenggarakan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 bekerjasama dengan Ormas-ormas Islam seperti NU, Muslimat NU, dan Muhamadiyah. Juga dengan Pondok Pesantren seperti Pesantren Darul Ulum Jombang.

h. Sosialisasi Melalui Media Massa

Menyadari akan pentingnya pemahaman terhadap Putusan MPR bagi masyarakat luas, Pimpinan MPR juga melakukan sosialisasi melalui media massa dengan menyelenggarakan dialog interaktif di TVRI dan RRI, serta terbitan rubrik khusus konstitusi di media cetak Rakyat Merdeka dan Republika, Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 juga dilaksanakan kepada insan pers yaitu secara khusus kepada para wartawan media cetak dan elektronik yang meliput di DPR/MPR. Dialog Interaktif di TVRI dan RRI selama masa bhakti 2004-2009 telah dilaksanakan sebanyak 128 kali.

i. Pendayagunaan Media E-Demokrasi di website *www.mpr.go.id*.

Sosialisasi Putusan MPR oleh Pimpinan MPR RI juga disajikan melalui media ***e-democracy www.mpr.go.id***. Pimpinan MPR RI menampung aspirasi masyarakat secara online melalui ruang Opini Anda dan Surat Pembaca. Secara spesifik kegiatan sosialisasi Putusan-Putusan MPR RI diberi porsi yang lebih dalam melalui penyediaan sub domain ***sosialisasi.mpr.go.id, kajian.mpr.go.id*** yang menjadi bagian dari ***www.mpr.go.id***.

j. Sosialisasi melalui Cerdas Cermat Konstitusi

Dalam rangka mendekatkan konstitusi pada anak-anak sekolah dan meningkatkan pemahaman Putusan MPR kepada generasi muda, maka sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, MPR menyelenggarakan Cerdas Cermat Konstitusi bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekalipun kadangkala disalahpahami oleh sebagian kalangan di Jakarta, tetapi penyelenggaraan Cerdas Cermat sebagai sarana sosialisasi Undang-Undang Dasar mendapat tanggapan yang positif di daerah karena dianggap efektif dalam memberikan pemahaman kepada para siswa. Tidak aneh bila para pejabat dan guru-guru di daerah mengusulkan kepada Pimpinan MPR agar sosialisasi dengan metoda ini dilanjutkan bahkan diperluas agar bisa diikuti oleh para pelajar tingkat SMP. Penyelenggaraan Cerdas Cermat Konstitusi Tingkat Nasional, didahului dengan seleksi di masing-masing provinsi. Selanjutnya sekolah yang menjadi pemenang di masing-masing provinsi kemudian berhak mewakili provinsinya maju ke babak final yang diselenggarakan di Jakarta. Penyelenggaraan sosialisasi melalui Cerdas Cermat Konstitusi telah diikuti oleh 973 sekolah di seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta sebanyak 12.025 siswa. Adapun yang keluar sebagai pemenang lomba adalah SMA Islamic Center Tangerang pada tahun 2007, SMA Negeri Kediri Tabanan Bali pada Tahun 2008, dan SMA Negeri 1 Metro Lampung pada tahun 2009.

k. Penerjemahan Undang-Undang Dasar Ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

UUD NRI Tahun 1945 adalah milik bangsa Indonesia. Namun demikian tidak berarti bahwa Undang-Undang Dasar tersebut tidak boleh dipelajari serta dipahami oleh bangsa lain, juga dalam rangka untuk sosialisasi ketentuan dan praktek berdemokrasi di Indonesia yang merujuk pada ketentuan dasar dari konstitusinya kepada masyarakat Internasional, maka Pimpinan MPR melakukan penerjemahaan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, yang hasilnya disampaikan kepada kedutaan besar negara-negara sahabat maupun para tamu Pimpinan Negara dan Pimpinan Parlemen negara-negara sahabat tersebut.

l. Pengiriman materi sosialisasi Putusan MPR ke daerah dan sekolah-sekolah.

Metoda sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan MPR adalah dengan mengirimkan materi sosialisasi putusan MPR ke daerah dan ke sekolah-sekolah. MPR telah mengirimkan materi sosialisasi dalam bentuk buku dan *compact disk* panduan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPRS dan MPR ke daerah dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sejumlah 129.595 set, masing-masing terdiri dari enam buku dan 12.000 keping

compact disc yang distribusikan ke pemerintah daerah, dinas-dinas pendidikan, maupun sekolah-sekolah yang ada baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

m. Pencantuman Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam Lembaran Negara

Berkembangnya wacana terkait keabsahan UUD NRI Tahun 1945 yang belum dicantumkan dalam Lembaran Negara menjadi salah satu isu panas pada awal masa jabatan MPR 2004-2009. Oleh karena itu Pimpinan MPR secara aktif mencarikan solusi dengan mencantumkan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam Lembaran Negara. Sekalipun secara perundang-undangan tidak ada kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 telah dicantumkan dalam Lembaran Negara No. 11 Tahun 2006. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 telah dicantumkan dalam Lembaran Negara No. 12 Tahun 2006. Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah dicantumkan dalam Lembaran Negara No. 13 Tahun 2006. Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 telah dicantumkan dalam Lembaran Negara No. 14 Tahun 2006. Dengan demikian, diharapkan polemik tentang hal ini sudah selesai, dan kita dapat fokus melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan mensosialisasikannya.

Saudara-saudara Anggota MPR dan Hadirin yang kami hormati,

Di samping melakukan pemasyarakatan putusan MPR, kami akan melaporkan pelaksanaan tugas Pimpinan MPR lainnya yakni terkait dengan:

a. Mewakili Majelis dan/atau Alat Kelengkapan Majelis di Pengadilan

Dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat dan daerah, MPR melaksanakan tugasnya mengemban amanat konstitusi, menegakkan kehidupan demokrasi, serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai kewenangan yang berikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya kadang-kadang tidak dapat dihindari adanya pihak-pihak yang tidak puas dan merasa kepentingannya dirugikan oleh tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh MPR dan alat kelengkapannya, sehingga pihak-pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan. Untuk menanggapi gugatan para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, maka Pimpinan MPR diberi wewenang oleh UU Susduk MPR Pasal 8 ayat (1) huruf f untuk mewakili Majelis dan/atau Alat Kelengkapan Majelis di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya Pimpinan MPR menunjuk kuasa hukum yang kompeten untuk membela kepentingan dan keberhakkan MPR. Gugatan diantaranya diajukan oleh Ibrahim Nurdin Saragih, S.H. sebagai Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 April 2005, Nomor Perkara 114/PDT.G/PN.JKT.PST, dan MPR sebagai Tergugat. Materi gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa Perubahan Pertama sampai dengan Perubahan Keempat Undang - Undang Dasar 1945 menyalahi aturan dan tidak sah karena tidak diumumkan dalam Lembaran Negara oleh karenanya harus dibatalkan. Setelah melalui proses persidangan maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/PDT.G/2005/PN.JKT.PST. Gugatan kepada MPR juga diajukan oleh Sdr. Endang Ilyas Susanto, S.H., M.H. melalui kuasa hukumnya Monang Saragih S.H., & Rekan, dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2009 dalam perkara Nomor 007/G/2009/PTUN-JKT. Pokok materi gugatan penggugat adalah memerintahkan kepada Ketua MPR selaku Tergugat untuk mengeluarkan Ketetapan MPR tentang Perubahan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 melalui penyelenggaraan Sidang istimewa MPR dengan agenda pokok mengubah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2009. Substansi Pasal 6A ayat (2) yang harus diubah adalah memperbolehkan calon Presiden dari jalur perseorangan/independen untuk mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Setelah melalui proses persidangan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima berdasarkan putusan pengadilan nomor 007/G/2009/PTUN-JKT tanggal 4 Februari 2009 yang dikuatkan dengan putusan pengadilan Nomor 07/PLW/2009/PTUN-JKT, tanggal 23 Maret 2009.

b. Pengelolaan Anggaran Majelis

Dalam pengelolaan Anggaran Majelis, Pimpinan MPR telah menetapkan kebijakan agar dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan efektif, dan efisien, berbasis kinerja, serta berdasar hukum, jauh dari korupsi. Sesuai dengan arah, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan, maka sesuai juga dengan ketentuan Undang-Undang Susduk MPR, Pasal 8 ayat (1) huruf h, Pimpinan MPR menugasi Sekretaris Jenderal MPR untuk melakukan pengelolaan keuangan MPR sehari-hari dalam rangka mendukung kegiatan MPR dan alat kelengkapannya. Kesungguhan Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal dalam mengelola keuangan MPR akhirnya memperoleh apresiasi yang positif berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2008 Nomor 10/S/V-XVI.1/06/2009. Laporan Keuangan MPR dinyatakan oleh BPK sebagai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

c. Pelantikan Anggota MPR RI Pengganti Antarwaktu

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Tata Tertib MPR, Anggota Majelis pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan Majelis. Selama masa bhakti 2004-2009, Pimpinan MPR telah memandu pengucapan sumpah/janji Anggota MPR RI sebanyak 22 kali pelantikan dengan pergantian Anggota MPR antar waktu sebanyak 112 Anggota MPR.

d. Pengkajian Kemajelisan

Selama masa bhakti 2004-2009, Pimpinan MPR telah menyelenggarakan kegiatan pengkajian kemajelisan melalui berbagai bentuk kajian yaitu antara lain Kajian Kelembagaan MPR melalui Revisi Undang Undang Susduk terkait dengan usulan penguatan tugas Pimpinan MPR, keberadaan lembaga MPR dan alat kelengkapan MPR untuk diajukan kepada Pansus RUU Susduk MPR, DPR,DPD dan DPRD. Untuk melakukan kajian terhadap Undang-Undang Susduk tersebut, Pimpinan MPR membentuk Tim Kajian yang komposisi keanggotaannya mencerminkan perwakilan fraksi-fraksi dan kelompok Anggota MPR yang ditentukan secara proporsional**.** Kajian MPR melalui revisi Peraturan Tata Tertib MPR dilaksanakan dalam rangka penyesuaian materi Peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Untuk melakukan kajian Pimpinan MPR membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR Nomor.2 /Pimp/2009, tanggal 6 Juli 2009. Komposisi Keanggotaan Tim Penyusun mencerminkan perwakilan fraksi-fraksi maupun kelompok anggota di MPR. Rapat gabungan Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi di MPR dan Kelompok Anggota DPD MPR pada tanggal 11 September 2009, menyepakati draft Tata Tertib yang merupakan usulan Pimpinan MPR periode 2004-2009 itu akan diusulkan kepada Pimpinan Sementara MPR melalui Setjen MPR RI.

e. Sebagai Narasumber Kegiatan Ilmiah

Pimpinan MPR juga aktif menghadiri berbagai undangan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan Ilmiah selaku nara sumber maupun pembicara pada kegiatan seminar, konferensi dan diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas, Lembaga Negara, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Pimpinan MPR juga mempergunakan kesempatan itu untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945.

f. Penerbitan Buku, Buletin dan Jurnal Majelis

Penerbitan buku atau referensi adalah bagian dari metode pemasyarakatan konstitusi melalui penulisan-penulisan ilmiah. Selama masa jabatan 2004-2009, Pimpinan MPR telah menerbitkan buku-buku, jurnal dan buletin Majelis, antara lain Buku Panduan Pemasyarakatan Putusan MPR, Buku tentang Sejarah – Realita- dan Dinamika MPR, Buku Hari Konstitusi, Buku Tentang MPR Masa jabatan 2004-2009, Aktifitas dan Dinamika, Buletin Majelis, serta Jurnal Majelis.

g. Penyusunan Buku Risalah Perubahan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR

Konstitusi akan dapat dipahami dengan baik apabila selain dibaca teksnya juga diketahui konteks yang akan menghadirkan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam terhadap teks itu. Atas dasar hal tersebut maka Pimpinan MPR berinisiatif menyelamatkan dokumen penting kesejarahan MPR dengan menyusun Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Risalah Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Untuk melakukan penyusunan, Pimpinan MPR membentuk Tim Penyusun yang anggotanya terdiri dari Anggota MPR dan mantan anggota MPR yang secara langsung terlibat dalam perumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini telah tersusun Risalah perubahan pertama sampai dengan keempat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Risalah Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, yang semuanya berjumlah 20 buku Risalah. Dengan disusunnya buku Risalah diharapkan adanya sumber rujukan yang bersifat otentik mengenai risalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

h. Peringatan Hari Ulang Tahun MPR RI dan Hari Konstitusi

Sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap momentum penting yang sangat bersejarah dari kelahiran lembaga MPR, maka mulai periode ini, setiap tahun Pimpinan MPR menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun MPR. Peringatan Hari Ulang Tahun MPR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2006, yaitu pada peringatan Hari Ulang Tahun MPR ke-61. Tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun MPR, karena tanggal 29 Agustus 1945 adalah hari bersejarah lahirnya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cikal bakal atau embrio lahirnya lembaga MPR.

Di samping peringatan Hari Ulang Tahun MPR, pada tahun 2009 ini juga untuk pertama kalinya diperingati Hari Konstitusi Indonesia yang telah dicanangkan pada tanggal 18 Agustus 2008 oleh beberapa Pimpinan Lembaga Negara dan tokoh masyarakat, antara lain oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, H. AM. Fatwa, Aksa Mahmud dari MPR, Prof.Dr. Ginanjar Kartasasmita dan Irman Gusman dari DPD serta Prof. DR. T. Sri Soemantri, Albert Hasibuan dari Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) yang memprakarsai pencanangan Hari Konstitusi Indonesia. Atas Usul Pimpinan MPR kepada Presiden dan Wakil Presiden pada Hari Ulang Tahun MPR ke-63 tanggal 29 Agustus 2008, maka Presiden yang menyambut positif usulan tersebut kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Pimpinan MPR menilai penting hari konstitusi ini karena ia bisa menjadi sarana yang efektif untuk sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan meningkatkan perhatian dan komitmen seluruh warga bangsa terhadap konstitusi Indonesia. Agar Hari Konstitusi lebih dikenal oleh masyarakat maka pada peringatan Hari Konstitusi ke-1 Pimpinan MPR menyelenggarakan serangkaian kegiatan antara lain seminar sehari tentang konstitusi, menerbitkan buku Hari

Konstitusi, dan membuat surat edaran kepada Pimpinan Lembaga-lembaga dan Kementerian untuk memperingati Hari Konstitusi, serta mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjadikan peringatan hari konstitusi sebagai rangkaian tak terpisahkan dari agenda kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

i. Pengelolaan Asset MPR RI

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, Pimpinan MPR mendorong dilaksanakanya pengembalian asset MPR yakni rumah dinas milik Setjen MPR yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 20, Bandung, Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengembalian asset milik Sekretariat Jenderal MPR dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengembalian Asset Sekretariat Jenderal MPR RI dan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asset MPR di Bandung tersebut rencananya akan dijadikan Gedung Museum MPR.

j. Penyerahan Arsip MPR ke Arsip Nasional RI

Dalam upaya menyelamatkan dokumen sejarah kenegaraan khususnya perjalanan kelembagaan MPR dan komitmen MPR untuk melaksanakan seluruh peraturan perundangan maka Pimpinan MPR mendukung sepenuhnya kebijakan Sekretariat Jenderal MPR untuk menyerahkan arsip MPR kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Maka pada tanggal 7 September 2009, Sekretariat Jenderal MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan MPR menyerahkan 80 jenis arsip Majelis sejak tahun 1984 hingga tahun 2004 kepada ANRI. Arsip yang sangat penting dan bernilai sejarah antara lain adalah arsip asli perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR, serta Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut ketua ANRI, Dr. Joko Utomo, MPR adalah Lembaga Negara yang pertama menyerahkan arsip otentiknya ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

***Sidang Majelis yang terhormat*,**

Demikianlah ringkasan laporan pelaksanaan kinerja Pimpinan MPR masa jabatan tahun 2004-2009 dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni periode 2004-2009. Apa yang dilakukan oleh Pimpinan MPR adalah upaya maksimal yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Tata Tertib MPR.

Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas baik oleh MPR sebagai lembaga negara maupun oleh Pimpinan MPR sebagai alat kelengkapan yang memimpin MPR, adalah hasil maksimal yang bisa dicapai sesuai dengan keterbatasan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan terus menerus menghadirkan yang lebih baik bagi MPR dan pelaksanaan tugas Pimpinan MPR masa jabatan 2009-2014, maka izinkan kami Pimpinan MPR masa jabatan 2004-2009 menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan MPR RI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pimpinan MPR Periode 2009-2014 berjumlah 5 orang, lebih banyak dari jumlah Pimpinan MPR Periode 2004-2009. Dengan demikian diharapkan bahwa mereka nanti dapat lebih kuat dan lebih efektif melaksanakan tugas dan wewenang ke-MPR-an untuk terus menjaga MPR sebagai lembaga yang terhormat.

b. Tindak Lanjut Pemasyarakatan Putusan MPR RI

Agar pelaksanaan sosialisasi Putusan MPR-UUD NRI Tahun 1945 semakin dapat mencapai sasaran yang lebih luas baik kualitas maupun kuantitas, maka selain melanjutkan sosialisasi yang sudah ada, juga perlu terobosan, ijtihad dan inovasi baru mengenai metoda pemasyarakatan putusan MPR ke berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tindaklanjut mengenai:

1) ***Optimalisasi Narasumber Training Of Trainers***. Narasumber ini perlu dioptimalkan untuk memberikan materi sosialisasi kepada masyarakat di provinsinya masing-masing atau di lingkungan departemennya. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan baik dari MPR, Pemerintah Pusat maupun daerah untuk mengoptimalisasikan narasumber tersebut agar sosialisasi di daerah dan beragam instansi pusat semakin dapat bergulir lebih cepat dan lebih baik.

2) ***Dialog Interaktif di TVRI dan RRI***. Pemasyarakatan Putusan MPR melalui dialog interaktif di TVRI dan RRI perlu dilanjutkan pada waktu yang akan datang, mengingat metoda ini sangat efektif kerena mampu menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat yang berada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, karena tersedianya sarana TVRI dan RRI sampai ke pelosok tanah air.

3) ***Cerdas Cermat Konstitusi***. Pelaksanaan sosialisasi melalui Cerdas Cermat Konstitusi memperoleh tanggapan yang positif dari para siswa dan guru-guru di daerah karena metode ini sangat efektif untuk para generasi muda dan para pelajar. Oleh karena itu Pimpinan MPR masa jabatan 2009-2014 perlu ***mempertimbangkan*** kesinambungan pelaksanaannya bahkan dengan peserta yang tidak terbatas hanya di tingkat SLTA tetapi di PTN dan SMP sebagaimana diusulkan oleh para dosen dan guru-guru di daerah.

4) ***Muatan Konstitusi dalam Kurikulum Sekolah***. Pemasyarakatan konstitusi melalui media pendidikan formal baik di Perguruan Tinggi maupun di sekolah-sekolah sangat efektif dilakukan *untuk* mempercepat proses pemasyarakatan konstitusi ke berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu terobosan lebih efektif agar materi konstitusi ini dapat ditetapkan menjadi salah satu muatan dalam kurikulum sekolah baik dalam pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

5) ***Peringatan Hari Konstitusi.*** Tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, dan pada tanggal 18 Agustus 2009 yang lalu untuk pertamakalinya MPR telah memperingati hari konstitusi. Oleh sebab itu dengan telah ditetapkannya tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, maka seluruh komponen bangsa perlu terus mencari terobosan agar dengan memperingati hari konstitusi dapat terus menggelorakan cinta dan kesadaran berkonstitusi. Dan dengan memperingati Hari Konstitusi itu dapat memberikan makna yang lebih dalam terhadap arti penting konstitusi itu sendiri dan terus mengupayakan agar peringatan hari Konstitusi merupakan rangkaian tak terpisahkan dari peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia.

6) ***Peringatan Hari Ulang Tahun MPR RI***. Tradisi memperingati HUT MPR RI yang baru dilaksanakan oleh Pimpinan MPR masa bhakti 2004-2009 sebagai bahan renungan dalam melanjutkan kiprah MPR. Oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan terhadap para *founding fathers* yang telah berjuang untuk lahirnya MPR ini maka tradisi peringatan HUT MPR pada setiap tanggal 29 Agustus perlu untuk terus dilaksanakan di masa yang akan datang dengan cara-cara yang lebih bermakna dan tepat sasaran.

7) ***Pembangunan Museum MPR.*** Dalam rangka melestarikan nilai sejarah MPR, saat ini Pimpinan telah mencanangkan hadirnya museum MPR yang direncanakan menampung seluruh dokumen serta dinamika perjalanan MPR sejak MPR berdiri. Melalui hadirnya museum ini diharapkan nilai-nilai historis yang dimiliki MPR akan selalu dapat terjaga. Mengingat sampai berakhirnya masa jabatan Pimpinan MPR periode 2004-2009 museum ini belum dapat direalisasikan, maka sangat baik bila MPR periode 2009-2014 dapat mewujudkannya dengan menjadikan asset Gedung MPR di Bandung itu sebagai Museum MPR.

8) ***Melanjutkan Pengelolaan Keuangan MPR yang Wajar Tanpa Pengecualian***. Pengelolaan keuangan negara khususnya keuangan MPR, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang diraih MPR adalah bagian dari kinerja Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal dalam melakukan pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbasis kinerja dan taat hukum. Melanjutkan komitmen ini akan menjadikan MPR sebagai lembaga negara yang dapat merealisasikan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, sehingga MPR akan selalu hadir sebagai lembaga negara yang terhormat.

Sidang Majelis yang terhormat,

Demikianlah ringkasan laporan kinerja MPR dan Pimpinannya masa bhakti 2004-2009, diharapkan laporan ini dapat merepresentasikan gerak langkah MPR dan Pimpinannya yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya yang limitatif itu.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan ampun kepada Allah SWT, juga permintaan maaf kepada rakyat Indonesia apabila selama masa bhakti 2004-2009 kami selaku Pimpinan MPR dinilai masih belum dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, bukan hanya karena memang tak ada gading yang tak retak, tapi memang adanya keterbatasan kewenangan dan tugas dari MPR dan Pimpinannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar-Undang-Undang yang tak mudah dipahami oleh masyarakat umum yang sering masih membayangkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan segala kewenangan dan *privilage* berikutnya.

Pada kesempatan ini pula Pimpinan MPR mengucapkan syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridhonya, maka Pimpinan MPR dapat melaksanakan amanah hingga ke akhir masa jabatan. Pimpinan MPR juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR, Pimpinan dan anggota Tim yang dibentuk Pimpinan MPR, kepada seluruh Anggota MPR dan Sekretariat Jenderal MPR RI atas kerjasama yang sangat baik, sehingga Pimpinan MPR dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal.

Terima kasih Pimpinan MPR RI juga tertuju kepada Pimpinan Lembaga-lembaga Negara, khususnya kepada Saudara Presiden RI, Bpk. Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono yang telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 untuk suksesnya Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 untuk menjadikan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, dua bentuk keputusan yang sangat membantu mensukseskan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan TNI dan Polri, masyarakat dan para insan pers, wartawan media cetak dan elektronik yang telah bekerja sama dengan Pimpinan dan Anggota MPR sehingga MPR masa jabatan ini dapat menunaikan tugas mulia termasuk penyelenggaraan Sidang Akhir Masa Jabatan ini dengan baik dan lancar.

Terakhir, marilah kita kembali mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. kepada kita bangsa Indonesia yang dengan perjuangan dan kerja keras dalam konteks demokrasi, kita telah berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa demokratis lain di dunia. Bahkan kini Indonesia selalu disebut dengan pujian sebagai negara terbesar ke-3 yang melaksanakan demokrasi bahkan sebagai negara dengan komunitas muslim terbesar yang melaksanakan demokrasi.

Kita tentu saja ingin mewariskan bangsa demokratis konstitusional yang besar ini kepada anak cucu kita, tetapi perjalanan kita memang masih panjang, namun kita yakin dengan semangat Bhineka Tunggal Ika sambil terus melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, maka NKRI akan makin terjaga, Pancasila makin teramalkan, cita-cita proklamasi dan amanat reformasi semakin bisa diwujudkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam membangun demokrasi sehingga bangsa dan negara kita menjadi lebih maju, adil, sejahtera, terhormat, jaya dan raya serta diridloi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya, dengan keyakinan doa dan harapan, perkenankan kami menutup Rapat Paripurna MPR ini disertai dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR, Saudara DR. (HC) A.M. FATWA dipersilakan.

PEMBACAAN DOA

Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Ketua MPR, Bapak Dr (HC) A.M. Fatwa yang telah memimpin do'a. Dengan iringan do'a yang baru saja kita persembahkan ke hadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka paripurnalah rangkaian acara Sidang MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2004-2009. ***"Berlayar Gagah Pelaut Bugis, Berdiri Megah Candi Prambanan, Berharap Saat Paripurna Habis, Mencinta Indonesia Makin Dikuatkan, Indah Nian Tari Serimpi, Cukup Sekian Terima Kasih"***.

Akhirul kalam, dengan mengucapkan *hamdallah Alhamdulillahhirobbil'alamin*, perkenankan kami menutup rapat Majelis ini sekaligus menutup Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Tahun 2004-2009. *Wallahulmuwaffiq ila aqwamiththoriq, Nashrun minallah wafathun qorib. Wassallamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 29 September 2009

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN MPR RI,

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

Ketua

Dr (HC) A. M. Fatwa	H. M. Aksa Mahmud	Dr. Hj. B.R.A. Mooryati Soedibyo
Wakil Ketua	Wakil Ketua	Wakil Ketua